

**LAPORAN HASIL PENELITIAN
KEILMUAN LANJUT**



**PENGARUH PENERAPAN *CORPORATE
GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA BANK
(Studi Empiris Pada Bank yang Terdaftar Di Bursa
Efek Indonesia)**

Oleh :

**Irma, S.E. M.S.ak
NIP : 19750831 199903 2 001**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TERBUKA
2012**



LEMBAR PENGESAHAN
Usulan Penelitian Bahan Ajar Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. a. Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Bank
b. Bidang Penelitian : Keilmuan
c. Klasifikasi Penelitian : Lanjut
2. Peneliti :
a. Nama lengkap dan Gelar : Irma, SE., M.S.ak
b. Jenis Kelamin : Perempuan
c. Pangkat, Golongan, NIP : Penata muda Tk 1, III/b, 19750831 199903 2 001
d. Program Studi/ Jurusan : Akuntansi / Manajemen
e. Jabatan Akademik : Asisten Ahli
f. Fakultas : Ekonomi
3. Lama Penelitian : 9 (sembilan) bulan
4. Biaya yang diperlukan : Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah)

Pondok Cabe, Desember 2012

Mengetahui Dekan,

Peneliti,

Drs. Yun Iswanto, M.Si
NIP. 19580126 198703 1 002

Irma, SE., M.S.ak
NIP. 19750831 199903 2 001

Menyetujui,
Ketua LPPM-UT

Menyetujui,
Ka. Puslitgasis

Dra. Dewi A. Padmo P., MA, Ph.D.
NIP. 19610724 198701 2 001

Dra. Endang Nugraheni, M.Ed, M.Si
NIP. 19570422 198503 2 001

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh indikator-indikator *corporate governance* seperti dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit terhadap kinerja bank yang diproksikan dengan *Camel Ratio* seperti CAR, NPL, LDR, BOPO, dan ROE. Penelitian ini menggunakan 30 bank yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia sebagai sampel dan *Structural Equation Modelling* (SEM) digunakan dalam menguji pengaruh indikator-indikator *corporate governance* terhadap kinerja bank. Dari hasil pengujian ditemukan bahwa indikator *corporate governance* dewan komisaris memiliki hubungan positif secara signifikan terhadap kinerja bank, artinya adalah semakin tinggi dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap kinerja bank maka semakin baik kinerja bank tersebut. Sedangkan untuk indikator *corporate governance* komite audit mempunyai hubungan yang positif terhadap kinerja bank namun pengaruhnya tidak signifikan. Sementara itu untuk indikator *corporate governance* kualitas audit memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap kinerja bank, artinya adalah semakin tinggi kualitas audit dari sebuah bank maka akan semakin tinggi kinerja bank tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian-penelitian terdahulu. Kesimpulannya adalah semakin tinggi atau semakin baik fungsi dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit pada suatu bank maka akan semakin baik kinerja bank.

Kata Kunci: *Corporate Governance*, Kinerja Bank, *Camel Ratio*, Dewan Komisaris, Komite Audit, Kualitas Audit

Abstract

This study aimed to examine the effect of corporate governance indicators such as the board of directors, audit committee and audit quality on bank performance which is proxied by Camel Ratio such CAR, NPL, LDR, BOPO, and ROE. This study used 30 banks listed in the Indonesia Stock Exchange as samples and Structural Equation Modelling (SEM) was used to test the influence of corporate governance indicators on the performance of the bank. From the test results found that corporate governance indicators, board of directors, has a significantly positive correlation to the performance of the bank, that is the higher the commissioners to supervise the bank, the better the performance of the bank. As for the indicators of corporate governance, the audit committee, has a positive effect on the performance of the bank but not significant. Meanwhile, corporate governance indicators of audit quality has a significant positive relationship to the performance of the bank, meaning the higher the quality audit of a bank, the higher performance of the bank. This is consistent with previous studies. The conclusion was that the higher or better functioning board of directors, audit committee and audit quality in the bank, the better the performance of the bank.

Keywords: Corporate Governance, Performance Bank, Camel Ratio, the Board, the Audit Committee, Audit Quality

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PENGESAHAN	2
ABSTRAK	3
DAFTAR ISI	4
1. PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Perumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Batasan Penelitian	12
1.6. Sistematika Penulisan	13
2. LANDASAN TEORI	15
2.1. <i>Corporate Governance</i> (GCG)	15
2.1.1. Teori-Teori <i>Corporate Governance</i>	15
2.1.2. Pengertian <i>Corporate Governance</i>	17
2.1.3. Prinsip-Prinsip <i>Corporate Governance</i>	20
2.1.4. Manfaat <i>Corporate Governance</i>	23
2.1.5. Mekanisme <i>Corporate Governance</i>	24
2.1.6. Dewan Komisaris	27
2.1.7. Komite Audit	29
2.2. Metode Pengukuran Kinerja Bank	30
2.2.1. Analisis <i>Trend</i>	31
2.2.2. Analisis <i>Common-Size</i>	31
2.2.3. Analisis Rasio Keuangan	32
2.3. Penelitian-Penelitian Sebelumnya	35
2.3.1. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Bank	35
2.3.2. Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Bank	38
2.3.3. Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Kinerja Bank	39
2.4. Kerangka Penelitian	40
2.5. Hipotesis Penelitian	43
3. METODOLOGI PENELITIAN	44
3.1 Model Penelitian	44
3.2 Operasionalisasi Penelitian	46
3.2.1 Variabel Laten	46
1. <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	46
2. <i>Non Performing Loan</i> (NPL)	47
3. <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	47
4. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional Rasio (BOPO)	47
5. <i>Return On Equity</i> (ROE)	47
3.2.2 Variabel Teramati	48
1. Dewan Komisaris	48
A. Ukuran Dewan Komisaris	48
B. Proporsi Komisaris Independen	49

C. Jumlah Rapat Dewan Komisaris	49
D. Latar Belakang Pendidikan Komisaris Utama	49
2. Komite Audit	50
A. Ukuran Komite Audit	50
B. Proporsi Komite Audit Independen	50
C. Jumlah Rapat Komite Audit	50
D. Pengalaman Bekerja Sebagai Auditor	51
E. Latar Belakang Pendidikan Anggota Komite Audit	51
3. Kualitas Audit	52
A. Audit Eksternal oleh Big Four dan Non Big Four	52
B. Opini Audit oleh Auditor Eksternal	52
3.3. Metode Pengumpulan Data	52
3.4. Metode Pemilihan Sampel	53
3.5. Pengujian Hipotesis	53
4. HASIL DAN PEMBAHASAN	54
4.1. Statistik Deskriptif	54
4.2. Tahapan dan Hasil Pengujian	57
4.2.1. Kecocokan Model Keseluruhan	57
4.2.2. Kecocokan Model Pengukuran	59
4.2.3. Kecocokan Model Struktural	60
4.3. Analisa Hasil Pengujian	62
5. KESIMPULAN DAN SARAN	63
5.1. Kesimpulan	63
5.2. Saran	64
5.3. Keterbatasan Penelitian	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	70

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Industri perbankan selalu menjadi obyek yang diminati untuk diteliti karena memiliki dua karakteristik yang membedakannya dengan industri lain pada umumnya. Karakteristik pertama yang dimiliki adalah dikenalnya industri perbankan sebagai industri yang padat regulasi (*highly regulated*). Hampir di setiap sisi kegiatan bank tidak lepas dari cakupan regulasi dan pantauan atau monitor dari badan penetap standar atau badan regulator, yang di Indonesia dilakukan Bank Indonesia (BI). Banyaknya ketentuan yang mengatur bisnis perbankan bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas. Hal tersebut merupakan konsekuensi yang diakibatkan oleh karakteristik perbankan yang kedua, yaitu industri perbankan merupakan industri usaha yang berbasis pada kepercayaan, khususnya kepercayaan para nasabahnya.

Masyarakat yang menjadi nasabah bank menempatkan dana yang dimiliki pada bank tanpa jaminan penuh dari bank, bahkan dengan tingkat pengembalian yang ditentukan oleh bank. Dan sesuai dengan perannya sebagai intermediasi dan penggerak roda perekonomian maka dana yang terkumpul dari masyarakat tersebut akan kembali disalurkan oleh bank dalam bentuk investasi lain. Dalam menjalankan aktivitasnya tersebut bank menghadapi berbagai macam risiko seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko legal. Untuk itu, bank perlu dikelola dengan tata kelola (*corporate governance*) yang baik oleh manajemen yang profesional dan memiliki integritas tinggi, sebab tanpa tata kelola yang baik bukan tidak mungkin industri perbankan akan mengalami *collaps* (keruntuhan) seperti yang terjadi pada tahun 1997 yang menjadi pukulan keras bagi industri perbankan saat itu.

Hal ini diawali dengan adanya krisis finansial di berbagai negara pada tahun 1997-1998 yang diawali krisis keuangan di Thailand pada tahun 1997 dan diikuti dengan krisis di Jepang, Korea, Indonesia, Malaysia, Hongkong dan

Singapura yang akhirnya berubah menjadi krisis finansial Asia ini dipandang sebagai akibat lemahnya praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di negara-negara Asia. Ini disebabkan adanya kondisi-kondisi obyektif yang relatif sama di negara-negara tersebut antara lain adanya hubungan yang erat antara pemerintah dan pelaku bisnis, konglomerasi dan monopoli, proteksi, dan intervensi pasar sehingga membuat negara-negara tersebut tidak siap memasuki era globalisasi dan pasar bebas (Tjager dkk, 2003).

Adanya kegagalan beberapa perusahaan dan timbulnya kasus malapraktik keuangan akibat krisis tersebut adalah akibat buruknya praktik *Corporate Governance* (CG). Menurut Pangestu dan Hariyanto dalam Suprayitno (2004), karakteristik lemahnya praktik CG di Asia Tenggara adalah: (1). Adanya konsentrasi kepemilikan dan kekuatan *insider shareholders* (termasuk pemerintah dan pihak-pihak yang berhubungan dengan pusat kekuatan), (2). Lemahnya *governance* sektor keuangan, dan (3). Ketidakefektifan *internal rules* dan tidak adanya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas untuk berhadapan dengan pemegang saham mayoritas dan manajer.

Krisis tahun 1997 di Indonesia sendiri diawali dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) dimana pemerintah bersama Bank Indonesia berusaha untuk melangkah lebih lanjut dalam deregulasi perbankan yang menjadi titik balik dari berbagai penertiban perbankan 1971-1972. Pemberian izin usaha bank baru yang telah dihentikan sejak tahun 1971 dibuka kembali oleh Pakto 88. Demikian pula dengan ijin pembukaan kantor cabang atau pendirian BPR menjadi lebih dipermudah dengan persyaratan modal ringan. Suatu kemudahan yang sebelumnya belum pernah dirasakan oleh dunia perbankan. Salah satu ketentuan fundamental dalam Pakto 88 adalah perijinan untuk bank devisa yang hanya mensyaratkan tingkat kesehatan dan aset bank minimal hanya Rp. 100 juta. Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah bank di Indonesia dari yang hanya berkisar 111 bank pada tahun 1988 menjadi sebanyak 240 bank pada tahun 1995. Peningkatan jumlah bank inilah yang mendorong peningkatan pelepasan kredit ke sektor riil sehingga memberi kontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang moderat di awal tahun 1990-an.

Namun demikian syarat yang cukup ringan bagi pendirian bank memiliki dampak negatif dan memicu peningkatan jumlah bank dan ekspansi perbankan

yang cukup agresif. Hal ini marak diwarnai dengan issue kepemilikan silang (*cross ownership*) dan manajemen silang (*cross management*) di industri keuangan Indonesia. Dua hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan konsentrasi kepemilikan pada industri perbankan, sehingga semakin besar kecenderungan terjadinya pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*) kepada grup perusahaan sendiri. Kondisi inilah yang melatarbelakangi terjadinya krisis ekonomi dan imbas yang cukup parah di sektor perbankan.

Setelah melalui masa krisis ekonomi, jumlah bank umum di Indonesia mengalami penurunan (dari sebanyak 237 bank di tahun 1997 menjadi hanya sebanyak 130 bank di tahun 2006 atau turun sebesar 45,2%), yang diakibatkan dari pembekuan operasional 67 bank dan sebagian lagi melakukan merger serta akuisisi. Penurunan jumlah tersebut merupakan dampak dari semakin ketatnya standar yang harus dipenuhi bagi berdirinya suatu bank, seperti struktur permodalan, serta adanya merger dan akuisisi dan penutupan bank karena adanya masalah keuangan.

Bila diperhatikan dari latar belakang dan kondisi tersebut, maka salah satu penyebab utama industri perbankan mengalami *collaps* pada saat krisis berkaitan dengan pengelolaan bank yang kurang baik oleh manajemen. Pelajaran berharga yang dapat diambil dari krisis finansial yang dialami oleh Indonesia adalah karena lemahnya penerapan konsep dan implementasi *good corporate governance* (GCG) dalam industri perbankan. Ketentuan pelaksanaan GCG pada bank bertujuan untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks, berupaya melindungi kepentingan stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

Organization Economic of Cooperation and Development (OECD) mengembangkan seperangkat prinsip-prinsip *corporate governance*, atau yang lebih dikenal sebagai *The OECD Principles Of Corporate Governance*. Prinsip-prinsip dasar dari *good corporate governance* meliputi asas transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan atau kewajaran, yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Prinsip-prinsip dasar ini tentu sangat diperlukan pada

pengelolaan bank-bank di industri perbankan dimana kepercayaan masyarakat menjadi komponen utamanya.

Salah satu faktor yang diperlukan untuk menciptakan *corporate governance* yang efektif, terutama setelah terjadinya krisis finansial di Asia adalah peranan dewan komisaris selaku pihak pengawas dalam perusahaan, khususnya dalam industri perbankan. Macey dan O'Hara (2003) menyatakan bahwa dewan komisaris sangat penting peranannya pada suatu bank yang salah satu penyebabnya adalah karena *governance* pada bank berbeda dengan perusahaan-perusahaan non bank. Alasan utama perbedaan ini disebabkan karena pentingnya keberadaan stakeholder bank yang lain seperti kreditur dan regulator. Direksi bank harus bertanggung jawab tidak hanya pada pemegang saham, tetapi juga pada depositor, nasabah, dan regulator.

Skully (2002) juga menyatakan bahwa peranan dewan komisaris sangat penting dalam penerapan *corporate governance* karena berjalannya pengawasan oleh dewan komisaris akan mengurangi risiko dana para pembayar pajak yang dapat digunakan sebagai mitigasi atau untuk menyelesaikan suatu krisis. Penerapan *corporate governance* yang baik juga dapat berperan dalam mengendalikan suatu praktik pemberian pinjaman pada pihak yang masih memiliki keterkaitan dengan bank.

Pada penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh penerapan *corporate governance* terdapat hasil yang bervariasi pada hubungan antara susunan dewan kepengurusan perusahaan dengan kinerja perusahaan. Sebagian besar penelitian menemukan tidak adanya pengaruh atau hubungan yang signifikan antara keberadaan dewan kepengurusan dalam perusahaan dengan kinerja perusahaan, seperti pada penelitian Bhagat dan Black (1999) dan penelitian Hermalin dan Weisbach (1991). Bahkan penelitian Eisenberg, Sundgren, dan Wells (1998) menemukan adanya hubungan negatif antara ukuran dewan komisaris dengan kinerja perusahaan atau bank.

Namun Rosentein dan Wyatt (1990) mengindikasikan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan secara statistik antara response harga saham dengan proporsi dewan yang independen. Hal ini juga di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Abeysekera (2008) terhadap perusahaan di Kenya, jumlah dewan komisaris yang dinilai efektif berada pada rentang lebih dari lima orang dan

kurang dari 14 orang. Ukuran dewan komisaris yang besar lebih efektif jika dibandingkan dengan ukuran dewan komisaris yang kecil (Dalton et al, 1999; Nasution dan Setiawan, 2007; dan Abeysekera, 2008). Dan menurut Andres, Azofra dan Lopez (2005) jumlah anggota dewan komisaris sangat mempengaruhi aktivitas pengendalian dan pengawasan. Semakin besar ukuran dewan komisaris diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap manajemen dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja perbankan atau perusahaan.

Hasil yang bervariasi dari literatur sebelumnya tersebut disebabkan karena adanya hubungan *endogenous*, yaitu hal-hal yang disebabkan dari dalam perusahaan sendiri (Hermalin dan Weisbach, 1991) dan hubungan sebab akibat (Kole, 1997) antara komposisi dewan kepengurusan dengan kinerja perusahaan.

Hasil penelitian yang belum konklusif inilah yang menjadikan hal ini cukup menarik untuk diteliti di Indonesia dan perlu juga diteliti faktor-faktor penting apa saja yang mendukung praktik pelaksanaan GCG dalam sektor perbankan, terutama yang mempengaruhi kinerja bank tersebut. Secara lebih spesifik penelitian ini akan mempergunakan tiga komponen penting dalam GCG yaitu karakteristik dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit yang akan dihubungkan dengan tingkat kinerja perusahaan perbankan yang diukur dengan menggunakan lima rasio keuangan yang termasuk kedalam rasio camel.

1.2. Perumusan Masalah

Dengan merujuk kepada hasil-hasil penelitian terdahulu yang belum menghasilkan kesimpulan yang konklusif mengenai pengaruh indikator-indikator Corporate Governance seperti Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap kinerja bank., permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja bank?
- b. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap kinerja bank?
- c. Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap kinerja bank?
- d. Bagaimana pengaruh antara satu indikator corporate governance dengan indikator lainnya terhadap kinerja bank?
- e. Bagaimana pengaruh dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit secara bersama-sama terhadap kinerja bank?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris dan mengetahui secara lebih mendalam mengenai seberapa jauh komponen *Good Corporate Governance* (GCG) berupa karakteristik dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit memiliki pengaruh terhadap tingkat kinerja bank yang diproksikan dengan CAMEL rasio pada bank-bank yang terdaftar (*listing*) dalam Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penting bagi perusahaan, masyarakat, dan badan penyetap standar (*regulator*). Bagi perusahaan atau manajemen, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan komponen penting *Good Corporate Governance* (GCG) dan karakteristik-karakteristik penting yang dimiliki oleh GCG agar dapat dilihat implikasinya terhadap tingkat kinerja dan kesehatan bank. Sementara itu bagi badan penyetap standar atau regulator, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pengaruh komponen penting dalam GCG yang memiliki implikasi pada tingkat kinerja suatu bank, sehingga badan penyetap standar atau pembuat kebijakan dapat memberikan perhatian lebih pada elemen-elemen penting GCG tersebut serta karakteristik-karakteristik utama yang dimilikinya. Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat umum mengenai gambaran tentang tingkat kinerja bank, terutama dilihat berdasarkan penerapan GCG yang melatarbelakanginya. Diharapkan juga dari penelitian ini diperoleh gambaran mengenai penerapan manajemen risiko pada bank melalui peranan dewan komisaris sehingga diperoleh tingkat kinerja bank tertentu.

1.5. Batasan Penelitian

Fokus utama dalam penelitian ini adalah tingkat kinerja keuangan bank-bank di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang ditunjukkan dengan analisis rasio keuangan melalui Camel Ratio serta hubungannya dengan komponen-komponen utama *Good Corporate Governance* (GCG). Komponen utama GCG yang akan ditelaah lebih mendalam adalah karakteristik dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit. Untuk itu dasar pembahasan yang akan

dipergunakan adalah laporan tahunan (*annual report*) bank-bank *go public* dan laporan keuangan yang telah diaudit yang terdapat di dalam laporan tahunan tersebut serta akan dipergunakan pula data lainnya yang dapat diakses secara umum bila diperlukan. Penelitian ini juga terbatas pada penggunaan lima rasio yang diharapkan dapat mewakili Camel Ratio yang menjadi proksi dari kinerja bank.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bagian yang saling terkait satu dan lainnya dimana setiap bagian akan mendukung penjelasan topik utama mengenai pengaruh tiga unsur penting dalam Good Corporate Governance (GCG) yaitu karakteristik dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit terhadap tingkat kinerja bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

BAB 1. Pendahuluan

Bab awal ini akan memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini secara menyeluruh dan merupakan penjelasan secara umum mengenai poin-poin penting yang akan dibahas secara lebih mendalam pada bagian selanjutnya. Bab ini terdiri dari latar belakang permasalahan termasuk gambaran umum industri perbankan di Indonesia, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lingkup dan batasan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB 2. Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan penjabaran dari teori-teori yang mendasari penelitian ini, yang akan dipergunakan sebagai landasan dilakukannya penelitian dan pembahasan lebih mendalam pada bab berikutnya. Pembahasan teori yang akan dilakukan antara lain adalah penjelasan mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) dan penerapannya pada industri perbankan di Indonesia, metode-metode penilaian kinerja industri perbankan serta uraian tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya berikut temuan-temuan dalam penelitian-penelitian tersebut.

BAB 3. Metodologi Penelitian

Bab ini menjabarkan metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penulisan. Hal lain yang akan dijelaskan adalah teknik pengumpulan data, metode analisis yang diterapkan serta penggunaan program komputer (SPSS atau E-Views) yang mendukung pengolahan data dalam penelitian ini.

BAB 4. Analisis dan Pembahasan

Bab ini membahas hasil yang telah diperoleh dari pengolahan data penelitian dan menganalisis secara lebih mendalam mengenai dugaan-dugaan yang telah dijabarkan pada bagian awal penelitian.

BAB 5. Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini akan ditarik kesimpulan setelah dilakukan analisis secara menyeluruh dari bab-bab sebelumnya, serta diberikan juga saran-saran yang mendukung bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam praktik pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), baik bagi dunia usaha maupun bagi regulator yang ada di Indonesia.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Good Corporate Governance (GCG)*

2.1.1. *Teori–Teori Corporate Governance*

Teori *corporate governance*, menurut Syakhroza (2003) dapat diformulasikan dalam model-model *corporate governance* yang bersifat mainstream seperti *finance* model (*agency theory*), *stewardship* model (*stewardship theory*), *stakeholders* model (*stakeholders theory*) atau *political* model (*political theory*) serta *myopic market* model.

Agency theory mengasumsikan bahwa manajer akan bertindak secara oportunistik dengan mengambil keuntungan pribadi sebelum memenuhi kepentingan pemegang saham. Teori Agensi ini timbul karena adanya perkembangan ilmu manajemen modern yang menggeser teori klasik, yaitu adanya aturan yang memisahkan pemilik perusahaan (*principal*) dengan para pengelola perusahaan (*agent*). Ketika perusahaan berkembang menjadi besar, apalagi pemegang saham semakin tersebar, semakin banyak *agency cost* yang terjadi dan pemilik semakin tidak dapat melakukan kontrol yang efektif terhadap manajer yang mengelola perusahaan.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) potensi konflik kepentingan bisa terjadi di antara pihak-pihak yang berhubungan seperti antara pemegang saham dengan manajer perusahaan (*agency costs of equity*) atau antara pemegang saham dengan kreditur (*agency costs of debt*). Menurut mereka *agency cost* meliputi tiga hal, yaitu *monitoring costs*, *bonding costs* dan *residual loss*. *Monitoring costs* merupakan pengeluaran yang dibayar oleh prinsipal untuk mengukur, mengamati dan mengontrol perilaku agen agar tidak menyimpang. Biaya ini timbul karena adanya ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen. Dalam situasi tertentu, agen memungkinkan untuk membelanjakan sumber daya perusahaan (*bonding costs*) untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak yang dapat merugikan prinsipal atau untuk meyakinkan bahwa prinsipal akan memberikan kompensasi jika dia benar-benar melakukan tindakan tersebut. Akan tetapi masih bisa terjadi perbedaan antara keputusankeputusan agen

dengan keputusan-keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan agen. Nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kesejahteraan yang dialami prinsipal disebut dengan *residual loss*.

Teori *agency* ini sangatlah sulit untuk diterapkan dan banyak kendala serta masih belum memadai, sehingga diperlukan suatu konsep yang lebih jelas mengenai perlindungan terhadap para stakeholders, yang menyangkut masalah-masalah konflik kepentingan dan biaya-biaya agensi yang akan timbul, sehingga berkembanglah suatu konsep baru yang memperhatikan dan mengatur kepentingan-kepentingan para pihak yang terkait dengan kepemilikan dan pengoperasional (*stakeholders*) suatu perusahaan, yang dikenal dengan konsep *corporate governance*.

Stewardship model mengasumsikan bahwa manajer adalah pelayan perusahaan yang baik dan rajin bekerja untuk mencapai tingkat laba dan tingkat pengembalian modal yang tinggi bagi pemegang saham. Manajer dapat memotivasi dirinya sendiri serta bekerja dengan inisiatif sendiri dan penuh tanggung jawab. Berdasarkan teori ini, keberadaan dewan komisaris yang berperan sebagai pengawas direksi mungkin menjadi tidak efektif.

Stakeholders model mengasumsikan bahwa perusahaan merupakan suatu sistem dari jaringan stakeholders yang beroperasi di dalam sistem yang lebih besar dalam suatu sistem masyarakat yang menyediakan infrastruktur pasar dan hukum bagi aktivitas perusahaan (Clarkson, 1994). Tujuan perusahaan dalam hal ini adalah menciptakan nilai bagi seluruh *stakeholders* dengan menciptakan barang dan jasa. Dalam model ini *corporate governance* merupakan sistem yang dirancang untuk memungkinkan dilakukan *check and balance mechanism* untuk menjamin terpeliharanya keseimbangan internal dan eksternal organisasi.

Political model menyatakan bahwa alokasi kekuasaan dalam perusahaan, privilege, atau alokasi laba di antara pemilik, manajer dan stakeholders lainnya ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan politis. Dalam hal ini pemerintah dapat berperan penting dalam menentukan alokasi tersebut. Alokasi kekuasaan dalam teori *corporate governance* juga harus dilihat dari perspektif budaya, sehingga dapat dikatakan tidak ada satu model *corporate governance* yang dapat digunakan sekaligus untuk beberapa negara, bahkan oleh beberapa perusahaan dalam satu negara.

Myopic market model menyatakan bahwa pasar sudah efisien, yaitu informasi yang tersedia di pasar sudah lengkap dan sempurna, serta tidak ada informasi yang tidak simetris sehingga kinerja perusahaan tercermin sepenuhnya pada harga pasar. Pasar dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang efektif terhadap perilaku perusahaan. Walaupun pada kenyataannya informasi di pasar cenderung terdistorsi karena belum bekerjanya pasar secara efisien.

2.1.2. Pengertian GCG

Menurut FCGI (2001) pengertian *Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan esktern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Sedangkan *Cadbury Committee* adalah seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka.

Menurut Rahmawati (2006), dalam Putri (2006), *Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan prinsip-prinsip antara lain *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*, yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, perusahaan (direksi dan komisaris), kreditur, karyawan serta stakeholders lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Berdasarkan definisi atau pengertian *good corporate governance* di atas dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya *good corporate governance* adalah mengenai sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit, yaitu hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.

Sedangkan tujuan dari *good corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Secara teoritis, pelaksanaan *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko

yang mungkin dilakukan oleh dewan komisaris dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan umumnya *good corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor (Tjager et al., 2003).

Darmawanti, Rahayu, dan Khomsiyah (2004), menyatakan isu *Corporate Governance* muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengelolaan perusahaan, atau sering kali dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diinvestasikan pada proyek yang menguntungkan sehingga tidak mendatangkan *return*. Moeljono (2002), menjelaskan bahwa *corporate governance* diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer.

Masalah *corporate governance* telah menjadi pokok bahasan penting oleh para pelaku bisnis di seluruh dunia menyusul desakan dari *institutional investor*, *Non Governmental Organizations* (NGOs) dan media massa, yang mengharuskan setiap perusahaan khususnya perusahaan *go public* untuk menerapkan *good corporate governance*. Desakan inilah yang mengharuskan Pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah melakukan reformasi *good corporate governance* dengan memperbaiki *governance standards* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Inti dari *corporate governance reform* pada *emerging markets* berkisar pada bagaimana mengembalikan kepercayaan investor dengan mengembangkan platform institusi yang kondusif bagi berkembangnya *investment market*.

Platform yang menjadi sorotan dalam *corporate governance reform* di berbagai negara termasuk di Indonesia adalah bagaimana memberdayakan dewan komisaris (*corporate board*), agar menjadi lebih efektif, profesional, dan bertanggung jawab. Selain itu, dewan komisaris juga diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi *good corporate governance* sehingga dengan demikian dewan komisaris berperan sebagai pendorong terciptanya perusahaan yang *well-governed*.

World Bank, dalam Maassen (2000), memberikan definisi *corporate governance* sebagai berikut: “*Corporate Governance refers to that blend of law, regulation and appropriate voluntary private sector practice which enable the*

corporation to attract financial and human capital, perform efficiently, and thereby perpetuate the interests of stakeholders and society as a whole”

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam BPKP (2003) memberikan pengertian *corporate governance* sebagai berikut: “*The structure through which shareholders, directors, managers set of the board objective of the company, the means of attaining those objectives and monitoring performance.*”

Finance Committee on Corporate Governance Malaysia dalam BPKP (2003) mendefinisikan *corporate governance* sebagai: “proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan kegiatan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah meningkatkan kemakmuran pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya”.

Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Kep1 17/M-MBU/2002 merumuskan pengertian sebagai berikut: “*corporate governance* adalah merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.”

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *corporate governance* pada intinya adalah merupakan suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. *Corporate governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

Tim *Corporate Governance* Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2003) menjelaskan bahwa keterkaitan antara konsep GCG dan *corporate management* (CM) terdapat pada organ direksi yang menunjukkan bahwa materi keterkaitan tersebut ada pada tataran yang sangat penting atau

menyangkut hal-hal yang strategis. Isi keterkaitan ini diwujudkan dalam bentuk komitmen bersama organ-organ perusahaan yang mencakup, visi, misi, tujuan, dan sasaran jangka panjang, strategi, serta ukuran penilaian kinerja. Komitmen itulah yang kemudian diimplementasikan oleh manajemen di bawah pimpinan direksi dalam bentuk pengelolaan perusahaan sehari-hari dan melalui upaya penciptaan budaya dan etika perusahaan yang mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Dengan demikian strategi yang diformulasikan oleh direksi selanjutnya dievaluasi oleh komisaris untuk dinilai kesesuaiannya dengan visi dan misi perusahaan. Selanjutnya dengan arahan komisaris, direksi bertanggung jawab mengelola kegiatan bisnis perusahaan menuju tujuan dari perusahaan dengan cara menjabarkan ke dalam program kerja dan rencana-rencana tindakan (*action plans*) nyata.

2.1.3. Prinsip-prinsip *Corporate governance*

Organization Economic Cooperation and Development (OECD) mengembangkan seperangkat prinsip-prinsip corporate governance, atau yang lebih dikenal sebagai *The OECD Principles Of Corporate Governance*. Prinsip-prinsip dasar dari *good corporate governance* meliputi:

1. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. (Kaihatu, 2006)

Prinsip-prinsip dasar *good corporate governance* yang dikeluarkan OECD menyatakan bahwa kerangka kerja *corporate governance* seharusnya (1) melindungi hak pemegang saham, (2) memperlakukan seluruh pemegang saham dengan sama, (3) mengakui hak-hak *stakeholder* sesuai dengan hukum yang berlaku dan menerapkan konsep corporate yang baik, (4) mengungkapkan seluruh hal yang material perusahaan dengan akurat dan tepat waktu, termasuk

Sedangkan Prinsip-prinsip *corporate governance* yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN melalui surat keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-1 17/M-MBU/2002 menyebutkan lima prinsip GCG yang meliputi:

1. Transparansi (*Transparency*)

Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (*stakeholders*). Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi (*accounting system*) yang berbasis standar akuntansi dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan *Information Technology* (IT) dan *Management Information System* (MIS) untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh dewan komisaris dan direksi, mengembangkan *enterprise risk management* yang memastikan bahwa semua risiko signifikan telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas, mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka.

2. Kemandirian (*Independence*)

Yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa terjadi benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

3. Akuntabilitas (*Accountability*)

Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

4. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan. Ini merupakan tanggung jawab korporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhankebutuhan masyarakat sekitarnya. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi professional, dan menjunjung etika memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

5. Keadilan (*Fairness*)

Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, perilaku perusahaan (*corporate conduct*), dan atau kebijakan, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*). Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas, membuat pedoman kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, *self-dealing*, dan konflik kepentingan, menetapkan peran dan tanggung jawab dewan komisaris, direksi, dan komite, termasuk sistem remunerasi, menyajikan informasi secara wajar atau pengungkapan penuh material apa pun, mengedepankan *Equal Job Opportunity*.

2.1.4. Manfaat *Corporate governance*

Manfaat dari pelaksanaan *good corporate governance* menurut FCGI (2001):

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen.

Sedangkan menurut IICG (2000), keuntungan yang bisa diambil oleh perusahaan apabila menerapkan konsep *good corporate governance* adalah:

- 1) Meminimalkan *agency cost*.
- 2) Selama ini para pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang kepada manajemen. Biaya-biaya ini bisa berupa kerugian karena manajemen menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun berupa biaya pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
- 3) Meminimalkan *cost of capital*.
- 4) Perusahaan yang baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditor. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya.
- 5) modal yang harus ditanggung bila perusahaan akan mengajukan pinjaman, selain itu dapat memperkuat kinerja keuangan juga akan membuat produk perusahaan akan menjadi lebih kompetitif.
- 6) Meningkatkan nilai saham perusahaan

Suatu perusahaan yang dikelola secara baik dan dalam kondisi sehat akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Sebuah survey yang dilakukan oleh Russel Reynolds Associates (1977) mengungkapkan bahwa kualitas dewan komisaris adalah salah satu faktor utama yang dinilai oleh investor institusional sebelum mereka memutuskan untuk membeli saham perusahaan tersebut.

7) Mengangkat citra perusahaan

Citra perusahaan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan perusahaan tersebut dimata masyarakat dan khususnya para investor. Citra (*image*) suatu perusahaan kadangkala akan menelan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan keuntungan perusahaan itu sendiri, guna memperbaiki citra tersebut.

2.1.5. Mekanisme *Corporate Governance*

Prinsip-prinsip *corporate governance* sebagaimana yang telah dibahas di atas berusaha diwujudkan dalam pengelolaan perusahaan dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, setiap perusahaan wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dalam jangka waktu enam bulan setelah tutup tahun buku. RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak antara lain konsolidasi, merger, akuisisi, kepailitan, dan pembubaran perusahaan, serta pengangkatan dan pemberhentian komisaris dan direksi.

2. Keterbukaan dan Transparansi

Direksi wajib menyusun laporan yang meliputi laporan keuangan tahunan terakhir, informasi tentang kegiatan usaha dan perubahannya, problem yang dihadapi, dan hasil-hasil yang telah dicapai. Laporan tersebut juga mengungkapkan nama direksi dan komisaris berikut remunerasi masing-masing direksi atau komisaris. Untuk perusahaan terbuka, laporan keuangan harus diperiksa (diaudit) oleh Akuntan Publik dan dipublikasikan dalam dua surat kabar beredar nasional. BAPEPAM telah menetapkan peraturan pada butir VIII.G.2 yang merinci hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan terbuka. Laporan tahunan harus mencakup antara lain ikhtisar data keuangan penting perusahaan untuk periode 5 (lima) tahun, analisis dan pembahasan manajemen, penjelasan mengenai investasi/divestasi, ekspansi, transaksi yang mengundang benturan kepentingan, dan transaksi dengan pihak afiliasi serta Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit.

Perusahaan terbuka wajib menyampaikan laporan berkala dan informasi material lainnya kepada BAPEPAM dan publik. Dalam rangka melakukan penawaran umum, Emiten/Perusahaan Publik wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran yang terdiri dari dokumen-dokumen yang meliputi aspek keterbukaan, akuntansi, dan hukum. Hampir semua dokumendokumen tersebut, termasuk prospektus, merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh semua pihak. Kemudian setelah Emiten/Perusahaan Publik melakukan penawaran umum, maka mereka wajib menyampaikan laporan kepada BAPEPAM dalam dua jenis yaitu laporan berkala dan laporan insidentil. Prinsip keterbukaan dan transparansi juga menekankan bahwa informasi yang diungkapkan perusahaan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Laporan keuangan Emiten/Perusahaan Publik wajib disusun dengan menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar akuntansi yang berlaku di Pasar Modal Indonesia, yaitu PSAK dan peraturan BAPEPAM di bidang akuntansi, secara signifikan telah sesuai dengan standar akuntansi internasional atau International Accounting Standards (IAS) (Herwidayatmo, 2004).

3. Keberadaan Komisaris Independen

Komisaris independen harus independen dari direksi dan pemegang saham pengendali dan tidak mempunyai kepentingan yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menjalankan kewajiban secara adil atas nama perusahaan. Adapun persyaratan menjadi komisaris independen adalah sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan terbuka yang bersangkutan;
- b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur dan/atau komisaris lainnya perusahaan terbuka yang bersangkutan;
- c. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lain yang terafiliasi dengan perusahaan terbuka yang bersangkutan;
- d. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- e. Diusulkan oleh pemegang saham dan dipilih oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris merupakan salah satu mekanisme corporate governance, karena fungsi monitoring yang dilakukan oleh dewan komisaris dipengaruhi oleh ukuran atau jumlah dewan komisaris. UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 mengatur bahwa perseroan yang: (1) bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, (2) menerbitkan surat pengakuan utang, dan (3) terbuka, wajib memiliki paling sedikit dua orang komisaris.

5. Komite Audit

Salah satu prasyarat implementasi GCG di BUMN dan perusahaan publik di Indonesia adalah keberadaan komite audit di dalam organisasi perusahaan. Di pasar modal, BAPEPAM melalui Surat Edaran (SE-03/PM/2000) merekomendasikan agar Emiten dan Perusahaan Publik memiliki Komite Audit yang membantu tugas Dewan Komisaris dengan memberikan pendapat profesional dan independen untuk meningkatkan kualitas kerja manajemen serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan.

Komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk:

- a. Meningkatkan kualitas laporan keuangan;
- b. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan;
- c. Meningkatkan efektivitas fungsi audit internal maupun audit eksternal;
- d. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

Berdasarkan strukturnya, komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) anggota. Salah satu dari anggota tersebut merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Intinya komite audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Komite audit tidak memiliki tujuan yang terpisah dari peran, kepentingan, dan akuntabilitas dewan komisaris.

6. Struktur Kepemilikan

Jensen dan Meekling (1976) menyatakan bahwa istilah struktur kepemilikan digunakan untuk menunjukkan bahwa variabel-variabel yang penting dalam struktur modal tidak hanya ditentukan oleh jumlah hutang dan modal sendiri tetapi juga persentase kepemilikan saham oleh *inside shareholders* dan *outside shareholders*. Konsentrasi kepemilikan dan perlindungan hukum merupakan kunci penentu praktek *corporate governance*. Keberadaan pemegang saham besar (large shareholders) atau kepemilikan yang terkonsentrasi merupakan mekanisme sistem perlindungan hukum bagi para pemegang saham. Pemegang saham besar memainkan peran aktif sebagai agen pengawas (monitoring agent). Dengan adanya agen pengawas ini, *agency problem* antara pemegang saham dengan manajer dapat dikurangi karena adanya jaminan bahwa manajer akan bertindak sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang dapat digunakan untuk mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas laba. Jensen dan Meekling (1976) menyatakan bahwa dengan meningkatkan kepemilikan manajerial berarti akan menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham, yang pada gilirannya akan mampu mengurangi oportunistik dari manajer. Manajer tidak lagi memiliki insentif untuk memanipulasi pelaporan keuangan untuk tujuan keuntungannya pribadi.

2.1.6. Dewan Komisaris

Peran penting dalam melaksanakan *corporate governance* berada pada dewan komisaris yang berfungsi sebagai pengawas aktifitas dan kinerja bank serta sebagai penasihat direksi dalam memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *corporate governance* yang baik (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (FCGI, 2001). Nasution dan Setiawan (2007) menyatakan secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Menurut Egon Zehnder (FCGI, 2001), dewan komisaris merupakan inti

corporate governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, dewan komisaris merupakan suatu mekanisme pengawasan dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan.

Menurut Herwidayatmo (2000), Indonesia menganut *two-tier boards system*, artinya bahwa komposisi dewan pengurus perseroan terdiri dari fungsi eksekutif yaitu dewan direksi dan fungsi pengendalian yaitu dewan komisaris. Berdasarkan kerangka hukum yang ada, fungsi *independent (non-executive) directors* pada *single-board system* dapat direpresentasikan dengan fungsi dewan komisaris pada *two-tier board system*. Oleh karena itu, sistem pengawasan yang ada pada perusahaan di Indonesia terletak pada dewan komisaris. Jumlah anggota dewan komisaris yang optimum akan lebih efektif daripada jumlah yang kecil (Dalton et al, 1999).

Selain itu, menurut Andres, Azofra dan Lopez (2005) jumlah anggota dewan komisaris sangat mempengaruhi aktivitas pengendalian dan pengawasan. Kusumawati dan LS (2005) dalam penelitiannya membuktikan bahwa variabel karakteristik dewan yang berupa jumlah komisaris terbukti berhubungan dengan nilai perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris biasanya mengadakan pertemuan rutin melalui rapat dewan komisaris. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 8/14/PBI/2006 dewan komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya empat kali dalam setahun.

Hasil penelitian yang dilakukan Vafeas (2003) menunjukkan bahwa jumlah rapat yang diselenggarakan dewan komisaris akan meningkatkan kinerja perusahaan. Sejalan dengan hasil penelitian Vafeas (2003), penelitian yang dilakukan oleh Brick dan Chidambaran (2007) menunjukkan semakin banyak frekuensi rapat yang diselenggarakan dewan komisaris maka akan meningkatkan kinerja perusahaan. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (KNKG, 2006). Komisaris independen ditetapkan sebagai seseorang yang independen dari posisi manajemen eksekutif atau fungsi manajemen lainnya dalam perusahaan dan bebas dari hubungan apapun yang dapat mempengaruhi keputusan mereka (Hegazy dan Hegazy, 2010)

Untuk lebih memantapkan efektifitas komisaris independen, keberadaan komisaris independen telah diatur dalam PBI Nomor: 8/14/PBI/2006 pasal 5 yang menetapkan bahwa komposisi komisaris independen sekurang-kurangnya berjumlah 50% dari jumlah anggota dewan komisaris. Menurut Ho dan Wang (2001) memasukkan anggota independen dalam dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan mencegah manajer membuat keputusan yang tidak efisien. Siallagan dan Machfoedz (2006) menggunakan proporsi komisaris independen untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas laba dan nilai perusahaan. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh secara positif terhadap nilai perusahaan.

2.1.7 Komite Audit

Komponen penting lain yang mendukung terlaksananya corporate governance yang baik, yaitu komite audit (FCGI, 2001). Sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Menurut Herwidayatmo (2000), syarat untuk menjadi anggota komite audit adalah independen atau tidak memiliki hubungan usaha maupun afiliasi dengan perusahaan, direktur, komisaris, maupun pemegang saham utama. Berdasarkan PBI Nomor: 8/4/PBI/2006, keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya merupakan komisaris independen perusahaan yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan dua anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana satu diantaranya memiliki keahlian dibidang keuangan atau akuntansi dan yang lainnya memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan. Abeysekera (2008) menyatakan bahwa komite audit merupakan mekanisme untuk memastikan tidak ada tindakan manajemen yang merugikan stakeholder. Komite audit dibentuk oleh komisaris dan bertanggung jawab kepada komisaris. Berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa:

- a. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum,
- b. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik
- c. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku
- d. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Menurut pasal 43, PBI Nomor: 8/4/PBI/2006 tugas dan tanggung jawab komite audit adalah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan perbankan.

Menurut Herwidayatmo (2000) tugas komite audit adalah memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi. Agar tugas dan fungsi komite audit dalam membantu dewan komisaris dapat berjalan secara efektif, komite audit minimal mengadakan rapat tiga sampai empat kali dalam satu tahun (FCGI, 2001).

2.2. Metode Pengukuran Kinerja Bank

Institusi perbankan mempunyai peranan yang vital dalam perekonomian suatu negara. Karena itu, sangat penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perekonomian untuk mengetahui baik atau buruknya kinerja bank-bank yang ada. Sampai saat ini, sudah banyak penelitian-penelitian yang dilakukan untuk mengukur kinerja industri perbankan di Indonesia, baik industri perbankan nasional secara keseluruhan maupun pengukuran kinerja untuk masing-masing bank. Pengukuran-pengukuran tersebut umumnya menggunakan metode pengukuran kinerja perusahaan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perbankan. Metode-metode tersebut antara lain adalah:

- Analisis *trend*
- Analisis *common-size*
- Analisis rasio keuangan

2.2.1. Analisis *trend*

Analisis ini dilakukan dengan cara mengamati data-data perbankan yang dianggap mewakili kinerja perbankan selama periode pengamatan. Misalnya, pengukuran return on asset pada beberapa bank tertentu selama periode tertentu. Dengan melakukan analisis terhadap data-data ini, akan dapat diketahui kinerja bank-bank tersebut selama periode pengamatan, apakah membaik atau malah sebaliknya. Hasil dari analisis ini juga dapat digunakan untuk melakukan *forecast* terhadap kinerja bank di masa datang.

Komponen-komponen yang sering digunakan dalam melakukan analisis trend antara lain adalah total aset, laba bersih, *return on equity* (ROE) dan *return on asset* (ROA). Pengamatan terhadap komponen-komponen tersebut dilakukan tiap periode pengamatan, sehingga dapat ditentukan, apakah terjadi peningkatan atau penurunan di masing-masing periode. Pengamatan terhadap komponen-komponen ini juga dilakukan terhadap bank-bank lain yang dianggap sebagai peer (bank-bank serupa) dari bank yang dievaluasi tersebut.

2.2.2. Analisis *Common-Size*

Analisis common-size dilakukan dengan cara menyatakan akun-akun yang terdapat pada laporan neraca sebagai presentase dari total aktiva dan akun-akun yang terdapat pada laporan laba-rugi sebagai presentase dari total pendapatan. Seperti halnya analisis *trend*, analisis *common-size* ini juga tidak hanya dilakukan pada satu bank saja namun juga dilakukan terhadap beberapa bank-bank lainnya yang dianggap sebagai peer dari bank yang akan dievaluasi.

Dengan melakukan perbandingan antara bank yang dievaluasi dengan bank-bank *peer*-nya, akan dapat diidentifikasi pada area mana bank tersebut memiliki kinerja yang lebih baik atau lebih buruk dibandingkan dengan bank *peer*-nya. Misal dilakukan pengukuran kinerja terhadap bank Z. Secara umum bank Z mempunyai kinerja paling baik, ditandai paling besarnya persentase laba bersih dan laba operasionalnya terhadap total pendapatan. Namun Bank Z perlu mengikuti Bank Y dalam mencari kreditur dan debitur, karena Bank Y mempunyai presentase beban bunga paling kecil dibandingkan ketiga bank lainnya, hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan bank Y mempunyai *interest margin* (selisih antara *interest rate* kredit dan sumber dana) yang besar.

2.2.3. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan digunakan untuk mengetahui risiko dan kinerja perusahaan. Pengolahan data dalam bentuk rasio adalah penting, karena dengan mengolah data keuangan perusahaan menjadi bentuk rasio memungkinkan untuk membandingkan risiko dan kinerja perusahaan-perusahaan dengan ukuran yang berbeda. Dengan analisis rasio ini, bisa diketahui karakteristik-karakteristik perusahaan baik dari sisi operasional, finansial dan investasinya. Banyak sekali rasio-rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, namun untuk industri perbankan, rasio-rasio yang digunakan berbeda dengan industri lainnya. Rasio-rasio yang sering digunakan oleh para analis untuk mengukur kinerja industri perbankan antara lain adalah rasio CAMEL.

Untuk menilai kinerja perusahaan perbankan umumnya digunakan lima aspek penilaian, yaitu: (1) capital, (2) assets, (3) management, (4) earnings, dan (5) liquidity yang biasa disebut CAMEL. Aspek-aspek tersebut menggunakan rasio keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank. Dalam kamus perbankan (Institut Bankir Indonesia 1999), CAMEL adalah aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank yang berpengaruh juga terhadap tingkat kesehatan bank. CAMEL merupakan tolak ukur objek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank. CAMEL terdiri atas lima kriteria yaitu: (1) modal, (2) aktiva (3) manajemen (4) pendapatan, dan (5) likuiditas. Peringkat CAMEL dibawah 81 memperlihatkan kondisi keuangan yang lemah yang ditunjukkan melalui neraca bank, seperti rasio kredit tak lancar terhadap total aktiva yang meningkat. Apabila hal tersebut tidak diatasi akan mengganggu kelangsungan usaha bank, bank yang terdaftar pada pengawasan dianggap sebagai bank bermasalah dan akan sering diperiksa oleh pengawas bank jika dibandingkan dengan bank yang tidak bermasalah. Bank dengan peringkat CAMEL diatas 81 adalah bank dengan pendapatan yang kuat dan aktiva tak lancar sedikit, peringkat CAMEL tidak pernah diinformasikan secara luas.

Rasio CAMEL adalah menggambarkan suatu hubungan atau perbandingan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dengan analisis rasio dapat diperoleh gambaran baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu bank. Rasio-rasio keuangan yang termasuk kedalam rasio CAMEL yaitu:

1. CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

Rasio ini memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank.

2. Rasio Aktiva Tetap terhadap Modal (ATTM)

Rasio ini mengukur kemampuan manajemen bank dalam menentukan besarnya aktiva tetap dan inventaris yang dimiliki bank yang bersangkutan terhadap modal. Semakin tinggi rasio ini artinya modal yang dimiliki bank kurang mencukupi dalam menunjang aktiva tetap dan inventaris sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar.

3. Rasio Aktiva Produktif Bermasalah (APB).

Rasio ini untuk menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktif bermasalah terhadap total aktiva produktif. Semakin tinggi rasio ini maka semakin buruk kualitas aktiva produktif yang menyebabkan PPAP yang tersedia semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Aktiva produktif bermasalah adalah aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.

4. NPL (*Non Performing Loan*)

Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.

5. Rasio PPAPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap Aktiva Produktif).

Rasio PPAP menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menjaga kualitas aktiva produktif sehingga jumlah PPAP dapat dikelola dengan baik. Semakin besar PPAP maka semakin buruk aktiva produktif bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Cakupan komponen aktiva produktif dan PPAP yang telah dibentuk sesuai dengan ketentuan Kualitas Aktiva Produktif yang berlaku.

6. Rasio pemenuhan PPAP.

Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menentukan besarnya PPAP yang telah dibentuk terhadap PPAP yang wajib dibentuk. Semakin besar rasio ini maka kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil karena semakin besar PPAP yang telah dibentuk dari PPAP yang wajib dibentuk. Penghitungan PPAP yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Kualitas Aktiva Produktif yang berlaku.

7. ROA (*Return on Assets*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Laba sebelum pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional sebelum pajak. Sedangkan rata-rata total aset adalah rata-rata volume usaha atau aktiva.

8. ROE (*Return on Equity*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin besar ROE, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Laba setelah pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional setelah dikurangi pajak sedangkan rata-rata total ekuitas adalah rata-rata modal inti yang dimiliki bank, perhitungan modal inti dilakukan berdasarkan ketentuan kewajiban modal minimum yang berlaku.

9. NIM (*Net Interest Margin*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Semakin besar rasio ini maka meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

10. BOPO (Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional)

Rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam

kondisi bermasalah semakin kecil. Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya.

11. LDR (*Loan to Deposit Ratio*)

Rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank yang dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Kredit yang diberikan tidak termasuk kredit kepada bank lain sedangkan untuk dana pihak ketiga adalah giro, tabungan, simpanan berjangka, sertifikat deposito.

2.3. Penelitian-Penelitian Sebelumnya

2.3.1. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Bank

Sistem pengawasan pada perusahaan terbagi menjadi dua jenis yaitu sistem “*two-tier*” dan sistem “*one-tier*”. Pada perusahaan terbatas yang menganut sistem organ perusahaan dengan “*two-tier*” *board system* seperti halnya di Indonesia, peran pengawasan perusahaan secara umum dilakukan oleh dewan komisaris, sedangkan pada perusahaan penganut sistem “*one-tier*” *board system*, maka fungsi pengawasan dilaksanakan oleh organ yang disebut sebagai *boards of directors*.

Penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai pentingnya penerapan *corporate governance*, khususnya dilakukan dengan studi kasus di negara lain, digunakan istilah *board of directors* untuk menggambarkan fungsi pengawasannya. Seperti misalnya salah satu penelitian yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Pathan (2007), yang meneliti ukuran dan independensi *board of directors* serta pengaruhnya pada kinerja perusahaan yaitu pada beberapa bank di Thailand. Thailand dapat dijadikan area penelitian yang cukup baik mengingat seperti halnya Indonesia, pada tahun 1997 negara tersebut juga mengalami krisis keuangan yang cukup parah. Pada penelitian yang menggunakan model panel *fixed effect* tersebut, diketahui bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan secara statistik antara ukuran dewan komisaris dengan kinerja bank yang ada di Thailand. Hal ini konsisten dengan hipotesis yang dibuat dan menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris yang lebih kecil akan lebih efektif dalam memonitor manajer bank, sedangkan board dengan ukuran yang

lebih besar lebih rentan untuk terkena *agency problem* (masalah keagenan) antara pihak pemilik perusahaan dan pihak yang menjalankan operasional perusahaan (manajer).

Hasil kedua yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah ditemukannya hubungan yang positif secara statistik antara *independensi board* pada bank di Thailand dengan kinerja bank. Hal ini menunjukkan bahwa *independent directors* lebih baik dalam melakukan monitor pada bank (khususnya di Thailand), karena **independent directors** juga memiliki *market reputation* yang perlu dijaga. Penemuan-penemuan pada penelitian tersebut menyarankan bank dapat meningkatkan kinerjanya dengan cara mengurangi jumlah atau ukuran board dan menambahkan beberapa lagi dewan komisaris yang independen.

Penelitian Eisenberg, Sundgren, and Wells (1998) juga menemukan adanya hubungan negatif antara ukuran dewan komisaris dengan kinerja perusahaan atau bank. Begitu pula dengan penelitian Hermalin and Weisbach (2003) yang menunjukkan bahwa dewan dengan ukuran yang lebih kecil akan lebih efektif dan dapat memberikan nilai tambah karena lebih mudah melakukan koordinasi di dalamnya.

Namun penelitian Kiel and Nicholson (2003) menemukan suatu hubungan positif yang signifikan antara ukuran *corporate board* dan kinerja perusahaan di antara perusahaan-perusahaan Australia yang besar. Ukuran dewan yang lebih besar akan memungkinkan terjadinya kesempatan yang lebih besar pula untuk melakukan networking dan adanya tambahan anggota yang memiliki keahlian sehingga dapat memberikan kontribusi untuk kinerja perusahaan dan bank yang jauh lebih baik dibandingkan dengan ukuran dewan yang kecil.

Hal ini juga di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Abeysekera (2008) terhadap perusahaan di Kenya, jumlah dewan komisaris yang dinilai efektif berada pada rentang lebih dari lima orang dan kurang dari 14 orang. Ukuran dewan komisaris yang besar lebih efektif jika dibandingkan dengan ukuran dewan komisaris yang kecil (Dalton et al, 1999; Nasution dan Setiawan, 2007; dan Abeysekera, 2008). Dan menurut Andres, Azofra dan Lopez (2005) jumlah anggota dewan komisaris sangat mempengaruhi aktivitas pengendalian dan pengawasan. Semakin besar ukuran dewan komisaris di harapkan dapat melakukan pengawasan terhadap manajemen dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja perbankan atau perusahaan.

Senada dengan hal ini, Adams and Mehran (2003) dan Belkhir (2005) menyatakan bahwa untuk perusahaan US Bank Holding Companies, ditemukan bahwa ukuran board dan kinerjanya memiliki hubungan positif. Penelitian ini menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh board dengan jumlah anggota yang besar atau lebih banyak akan memiliki keuntungan yang akan melebihi biaya yang timbul karenanya. Hubungan positif antara ukuran board dan kinerja pada perusahaan-perusahaan di Amerika tersebut lebih jauh dapat dijelaskan karena adanya merger dan akuisisi pada industri perbankan di Amerika.

Dari segi tingkat independensi board dari suatu bank, ditemukan berbagai macam hasil penelitian secara empiris yang menyatakan hubungannya dengan tingkat kinerja bank. Meskipun demikian banyaknya perubahan di beberapa negara yang menginginkan adanya penambahan anggota komisaris independen atau independen pada dewan, mempengaruhi pendapat regulator bahwa dengan semakin banyaknya anggota yang independen pada dewan komisaris akan semakin memperbaiki fungsi monitor yang ada.

Fama dan Jensen (1983), menjelaskan bahwa independent director akan memiliki insentif untuk melakukan perlindungan terhadap pemegang sahamnya karena mereka ingin mempertahankan reputasi baik mereka di pasar. Penelitian Pathan, Skully, dan Wickramanayake (2007) menyimpulkan terdapat pengaruh signifikan positif antara proporsi komisaris independen dengan kinerja perbankan. Komposisi komisaris independen juga berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (Abor dan Biekpe, 2007).

Namun beberapa penelitian lain menemukan tidak adanya hubungan antara independensi dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan atau bank bahkan terdapat beberapa penelitian yang menemukan adanya hubungan negatif antara independensi board dengan kinerja perusahaan seperti penelitian Kiel dan Nicholson (2003) serta penelitian Filatotchev, Lien, dan Piesse (2005) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Berbagai penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh komisaris independen terhadap kinerja perusahaan (baik positif maupun negatif).

Sementara itu, beberapa penelitian yang menguji pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan menunjukkan bahwa semakin banyak

rapat yang dilakukan dewan komisaris akan semakin meningkatkan pengawasan yang kemudian akan berdampak pada kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Vafeas (2003) dan Brick dan Chidambaran (2007) menunjukkan bahwa semakin banyak frekuensi rapat yang diselenggarakan dewan komisaris maka akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Latar belakang pendidikan komisaris utama juga merupakan satu indikator dari adanya penerapan corporate governance yang baik. Dalam penelitiannya, Kusumastuti, Supatmi, dan Sastra (2007) menyatakan meskipun bukan menjadi suatu keharusan bagi seseorang yang beraktivitas di dunia bisnis untuk berpendidikan bisnis, akan lebih baik jika anggota dewan memiliki latar belakang pendidikan bisnis dan ekonomi. Latar belakang pendidikan komisaris utama di bidang bisnis dan ekonomi menjadi penting bagi perbankan karena pengetahuan di bidang bisnis dan ekonomi dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis perbankan. Dengan memiliki pengetahuan bisnis dan ekonomi, komisaris utama memiliki pengetahuan dan kemampuan lebih baik untuk mengelola bisnis dan mengambil keputusan usaha (bisnis) yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.

2.3.2. Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Bank

Komponen penting lain yang mendukung terlaksananya corporate governance yang baik, yaitu komite audit (FCGI, 2001). Sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan dan pengelolaan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Xie, Davidson dan DaDalt (2003) menemukan bahwa komite audit merupakan faktor penting dalam pengawasan terhadap manajemen. Dalam penelitian tersebut rata-rata komite audit yang dimiliki oleh perusahaan sampel adalah 5 orang anggota dalam rentang 2 hingga 12 anggota. Jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap besarnya pengaruh yang dapat diberikan terhadap perusahaan, ukuran komite audit yang lebih besar diharapkan dapat menjaga kinerja bank dengan lebih baik.

Sementara itu penelitian yang menguji pengaruh anggota komite audit yang independen terhadap kinerja perusahaan atau bank dilakukan oleh Nasution dan Setiawan (2007) dan Li et al (2008). Dari hasil penelitian mereka terungkap bahwa

anggota komite audit yang independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Dengan adanya komite audit independen diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Di sisi lain, Alijoyo (2003) menyatakan bahwa Komite audit harus transparan, dimulai dengan keharusan adanya audit charter dan agenda program kerja tahunan tertulis dari komite audit yang kemudian didukung dengan keteraturan rapat komite audit. Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang menyangkut sistem pelaporan keuangan, komite audit perlu mengadakan rapat tiga sampai empat kali dalam setahun (FCGI, 2001). Semakin banyak rapat komite audit yang dilakukan akan meningkatkan kinerja komite audit. Dengan diadakannya rapat komite audit yang rutin diharapkan dapat meningkatkan kinerja bank.

Menurut Dezoort dan Salterio (2001) anggota komite audit yang memiliki pengetahuan tentang pelaporan audit dan keuangan memberikan dukungan terhadap auditor eksternal dalam perselisihan yang terjadi dengan pihak manajemen. Dezoort (1998) juga menemukan bahwa pengetahuan dan keahlian dalam bidang akuntansi/audit sangat diperlukan oleh anggota komite audit dalam menyelesaikan perselisihan pendapat antara pihak manajemen dengan auditor eksternal. Adanya perselisihan antara pihak manajemen dengan auditor eksternal dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, sehingga dengan adanya komite audit yang dapat menyelesaikan perselisihan tersebut maka diharapkan perusahaan memiliki kinerja yang baik.

2.3.3. Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Kinerja Bank

Audit merupakan proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif, yang berkaitan dengan asersi tentang tindakan-tindakan ekonomi untuk mengukur tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Kell, 2001). Hasil dari proses audit adalah laporan auditor (opini audit), yaitu laporan yang berisi tentang kewajaran laporan keuangan menurut prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

Dari sisi teori keagenan peran auditor eksternal adalah sebagai alat pengendalian yang dapat digunakan untuk menghilangkan atau setidaknya

memberikan sinyal atas praktik oportunistik atau kecurangan yang dilakukan manajemen seperti manajemen laba (Jensen dan Meckling, 1976; Watts dan Zimmerman, 1986). Audit akan mengurangi asimetri informasi yang ada antara manajemen dan stakeholders perusahaan dengan memungkinkan pihak luar untuk memverifikasi validitas laporan keuangan. Kinney dan Martin (1994) meneliti sembilan penelitian dan menemukan bahwa audit mengurangi bias positif pada laba bersih dan aktiva bersih sebelum diaudit.

Kualitas audit yang baik seharusnya dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh manajemen contohnya seperti pengelolaan laba dan melaporkan kinerja perusahaan yang sebenarnya sehingga tidak membohongi investor. Ukuran KAP diduga dapat mempengaruhi kualitas audit karena ukuran KAP yang besar biasanya tidak akan mengambil risiko dalam mengaudit kinerja keuangan kliennya, dan cenderung akan melaporkan kinerja perusahaan yang sebenarnya, sehingga dapat memacu perusahaan untuk benar-benar meningkatkan kinerja operasinya.

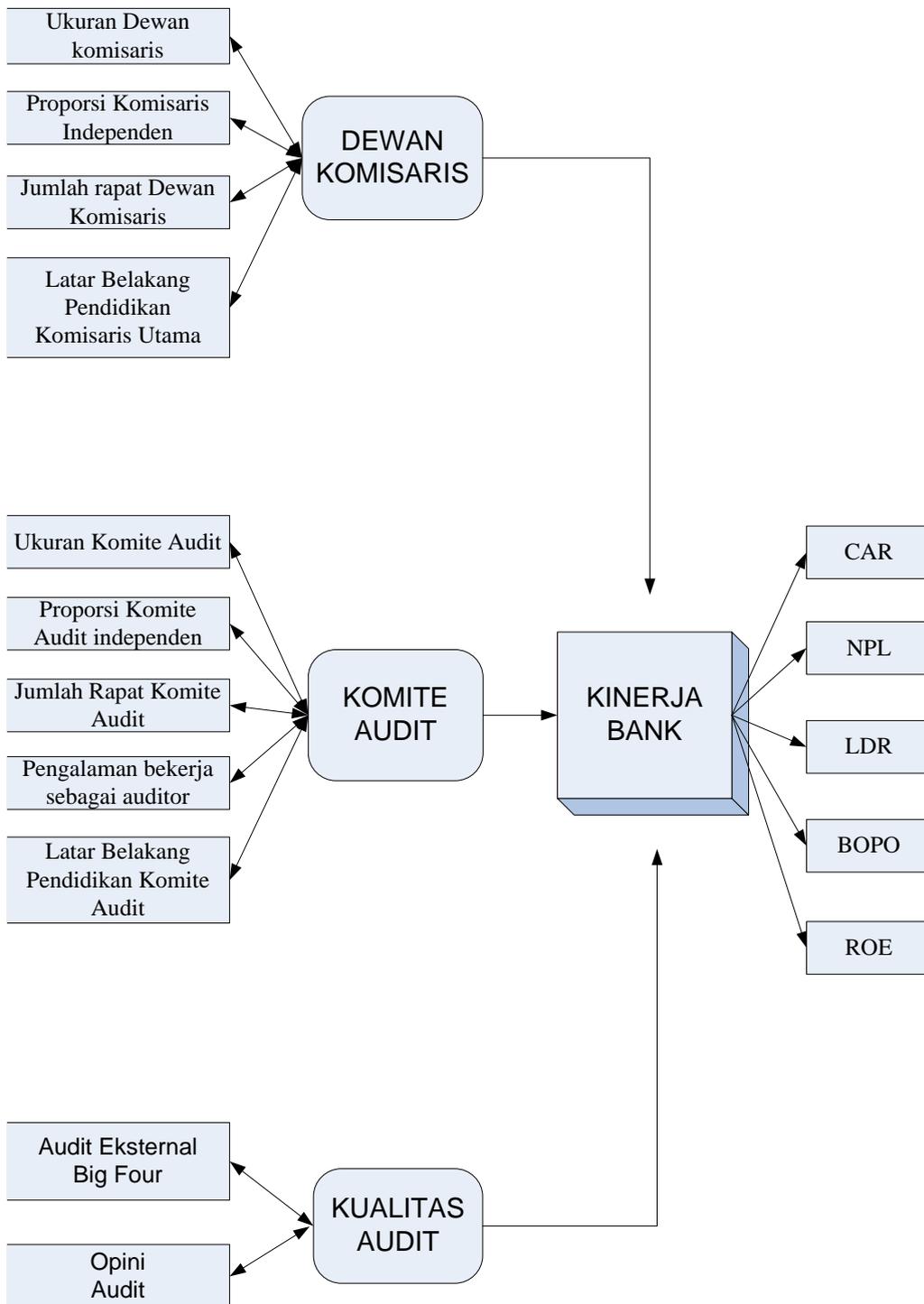
2.4. Kerangka Penelitian

Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, diperoleh sebuah kerangka pemikiran teoritis untuk mendukung penelitian ini. Penelitian ini dimulai dengan mengukur pengaruh corporate governance (CG) terhadap kinerja bank. Variabel CG yang dipilih adalah dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit. Pengaruh dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit terhadap kinerja bank dilakukan dengan membuat proksi pada masing-masing variabel independen dan variabel dependen.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja bank yang diproksikan dengan CAMEL rasio. Adapun rasio-rasio yang dianggap mewakili keseluruhan rasio CAMEL dalam penelitian ini adalah rasio CAR, NPL, LDR, BOPO dan ROE. Sementara itu variabel independen dalam penelitian ini adalah tiga indikator penerapan Good Corporate Governance (GCG) yaitu dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit. Variabel independen dewan komisaris diproksikan dengan empat variabel yaitu variabel ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, dan latar belakang pendidikan komisaris utama. Dua variabel independen lainnya adalah komite audit dan kualitas audit. Variabel independen komite audit diproksikan oleh lima

variabel yaitu variabel jumlah komite audit, proporsi komite audit independen, pengalaman anggota komite audit bekerja sebagai auditor, jumlah rapat komite audit, dan latar belakang pendidikan komite audit. Sedangkan variabel independen ketiga yaitu variabel kualitas audit diukur dengan menggunakan variabel dummy dari ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas bank-bank yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Jika perusahaan atau bank di audit oleh KAP Big 4 (KAP besar) maka kualitas auditnya tinggi namun jika bank di audit oleh KAP Non Big 4 (KAP kecil) maka kuantitas auditnya rendah. Selain itu kualitas audit juga diukur dengan variabel opini audit. Dalam pengukurannya variabel opini audit menggunakan variabel dummy yaitu 1 apabila perusahaan mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 0 apabila perusahaan mendapatkan opini audit selain dari WTP.

Berdasarkan hal tersebut maka kerangka penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Penelitian

2.5. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian-penelitian terdahulu maka hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

- H1: Dewan komisaris sebagai indikator *Corporate Governance* mempunyai pengaruh terhadap kinerja bank.
- H2: Komite audit sebagai indikator *Corporate Governance* mempunyai pengaruh terhadap kinerja bank.
- H3: Kualitas audit sebagai indikator *Corporate Governance* mempunyai pengaruh terhadap kinerja bank.

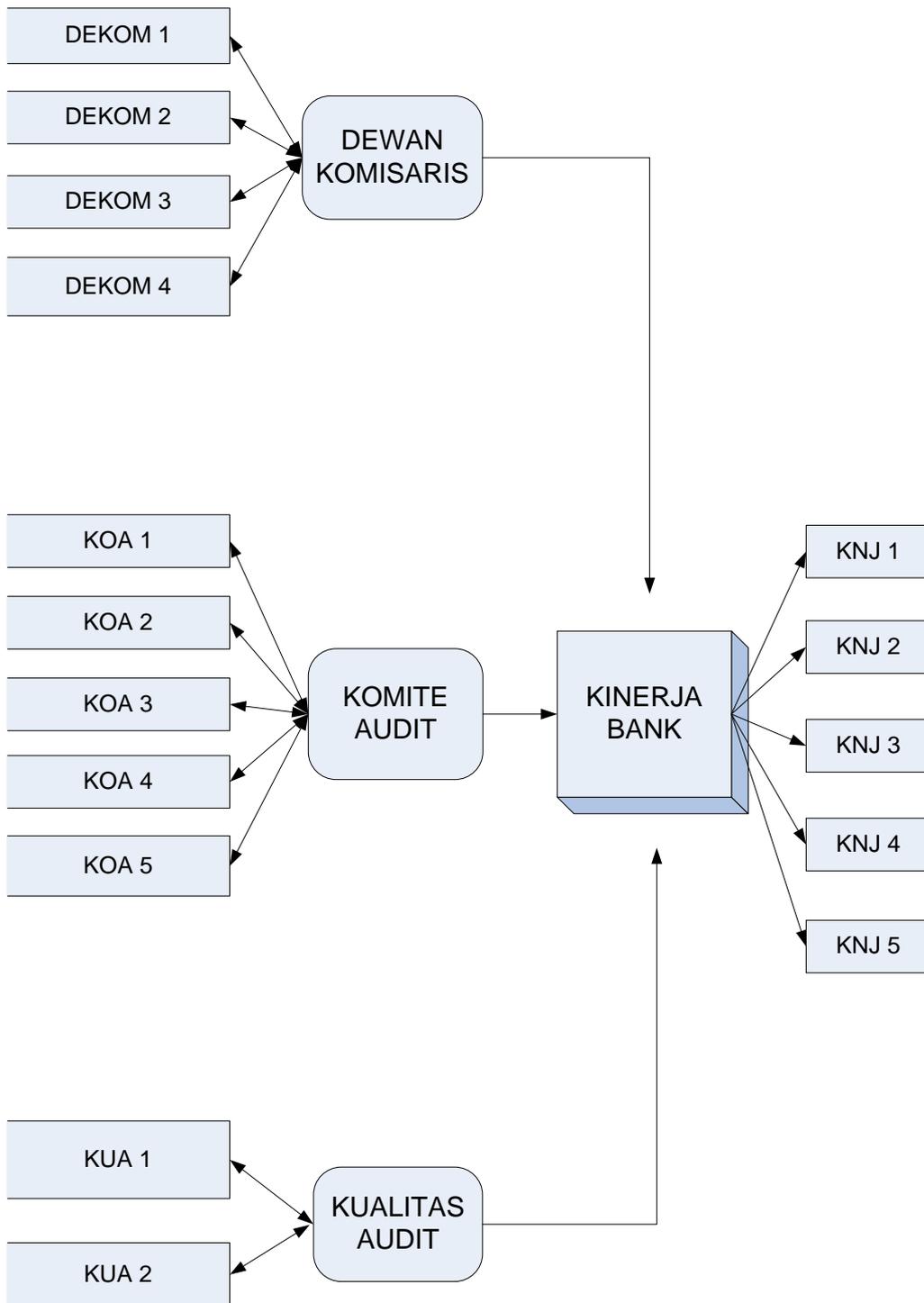
BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk *Structural Equation Model* (SEM). Chin dan Todd (1995), melakukan penelitian yang didasarkan pada pemikiran bahwa penggunaan *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan programnya (LISREL, EQS, atau PLS), dapat meningkatkan teknik analisis dalam riset sistem informasi. Teknik analisis ini penting untuk memahami problem yang terjadi dalam riset sistem informasi. Piranti lunak yang digunakan untuk menguji model dalam penelitian ini adalah program Lisrel 8.72 full version.

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen Dewan Komisaris, Komite Audit dan Kualitas Audit terhadap variabel dependen Kinerja Bank (CAR, NPL, LDR, BOPO, dan ROE) maka dibentuk satu model *Structural Equation Model* (SEM) untuk menguji hipotesis 1 hingga hipotesis 3. Sementara itu untuk model pengukuran dalam penelitian ini menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) yang menunjukkan sebuah variabel laten diukur oleh satu atau lebih variabel-variabel teramati. Dalam hal ini variabel laten yang diukur adalah Kinerja Bank sedangkan variabel-variabel teramati yang digunakan untuk mengukur variabel kinerja bank adalah variabel Dewan komisaris, Komite audit, dan Kualitas audit yang ketiga-tiganya merupakan indikator *Corporate Governance*. Maka model penelitian dengan menggunakan CFA adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Model Penelitian dengan CFA

3.2 Operasionalisasi Variabel

3.2.1 Variabel Laten

Variabel laten merupakan variabel kunci yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini. Variabel ini merupakan konsep abstrak yang hanya dapat diamati secara tidak langsung dan tidak sempurna melalui efeknya pada variabel teramati (Wijanto, 2006).

Variabel laten dalam penelitian ini adalah Kinerja Bank (KB) yang diukur dengan menggunakan *CAMEL ratio* yang diwakili oleh lima rasio yang terdapat dalam kelompok *CAMEL ratio* yaitu: CAR (*Capital Adequacy Ratio*), NPL (*Non Performing Loan*), LDR (*Loan to Deposit Ratio*), BOPO (Ratio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional), dan ROE (*Return On Equity*). Adapun formula dari masing-masing rasio menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 dijelaskan pada uraian berikut ini.

1. CAR (*Capital Adequacy Ratio*),

Yaitu rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, dan tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank. Rasio ini dapat dirumuskan dengan formula sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank} \times 100\%}{\text{Total ATMR}}$$

2. NPL (*Non Performing Loan*),

Yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Semakin tinggi rasio ini maka semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Kredit dalam hal ini adalah kredit bermasalah dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Rasio ini dapat dirumuskan dengan formula sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Kredit bermasalah} \times 100\%}{\text{Total kredit}}$$

3. LDR (*Loan to Deposit Ratio*),

Yaitu rasio yang digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin rendah kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Kredit yang diberikan tidak termasuk kredit kepada bank lain sedangkan untuk dana pihak ketiga adalah giro, tabungan, simpanan berjangka, dan sertifikat deposito. Rasio ini dapat dirumuskan dengan formula sebagai berikut:

$$LDR = \frac{\text{Total kredit}}{\text{Total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

4. BOPO (Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional),

Yaitu rasio yang sering disebut rasio efisiensi dan digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan suatu bank sehingga kemungkinan bank tersebut dalam kondisi bermasalah semakin kecil dan kinerjanya dinilai baik. Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya. Rasio ini dapat dirumuskan dengan formula sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

5. ROE (*Return On Equity*),

Yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin besar ROE maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Laba setelah pajak adalah laba bersih dari kegiatan operasional setelah dikurangi pajak sedangkan rata-rata total ekuitas adalah rata-rata modal inti yang dimiliki bank, perhitungan modal inti dilakukan berdasarkan ketentuan kewajiban modal

minimum yang berlaku. Rasio ini dapat dirumuskan dengan formula sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba setelah pajak} \times 100\%}{\text{Rata - rata ekuitas}}$$

3.2.2 Variabel Teramati

Variabel teramati dalam penelitian ini adalah tiga indikator penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit. Variabel independen dewan komisaris diproksikan dengan empat variabel yaitu variabel ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, dan latar belakang pendidikan komisaris utama. Dua variabel independen lainnya adalah komite audit dan kualitas audit. Variabel independen komite audit diproksikan oleh lima variabel yaitu variabel jumlah komite audit, proporsi komite audit independen, jumlah rapat komite audit, pengalaman anggota komite audit bekerja sebagai auditor, dan latar belakang pendidikan komite audit. Sedangkan variabel independen ketiga yaitu variabel kualitas audit diukur dengan menggunakan variabel dummy dari ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas bank-bank yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Jika perusahaan atau bank di audit oleh KAP Big 4 (KAP besar) maka kualitas auditnya tinggi namun jika bank di audit oleh KAP Non Big 4 (KAP kecil) maka kuantitas auditnya rendah. Adapun rincian operasionalisasi masing-masing variabel dijelaskan dalam uraian berikut.

1. DEWAN KOMISARIS

A. Ukuran Dewan Komisaris

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, definisi dewan komisaris adalah anggota perseroan yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat pada direksi. Ukuran dewan direksi diukur berdasarkan jumlah komisaris yang terdapat pada jajaran dewan komisaris, baik komisaris internal maupun komisaris eksternal perusahaan.

Dalam penelitian ini ukuran dewan komisaris dilambangkan dengan SIZEKOM, yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{SIZEKOM} = \sum \text{Komisaris Internal} + \sum \text{Komisaris Eksternal}$$

B. Proporsi Komisaris Independen

Persyaratan seorang komisaris independen adalah bukan anggota manajemen, bukan pemegang saham mayoritas, tidak menjabat sebagai eksekutif perusahaan dalam tiga tahun terakhir, bukan penasihat profesional perusahaan, bukan pemasok/pelanggan yang signifikan bagi perusahaan, tidak memiliki perjanjian kontraktual, dan terbebas dari urusan bisnis apapun dengan perusahaan (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*, 2002). Dalam penelitian ini proporsi komisaris independen dilambangkan dengan PROKOM, yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{PROKOM} = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Anggota Dewan Komisaris}} \times 100 \%$$

C. Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Rapat dewan komisaris merupakan suatu proses yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam pengambilan suatu keputusan mengenai kebijakan perusahaan. Xie et al.(2003) menyatakan bahwa semakin seringnya dewan komisaris bertemu atau mengadakan rapat, maka penyimpangan pengelolaan semakin kecil. Dalam penelitian ini jumlah rapat dewan komisaris dilambangkan dengan MEETKOM, yang dihitung dengan menggunakan rumus:

MEETKOM = Jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris selama satu tahun fiskal.

D. Latar Belakang Pendidikan Komisaris Utama

Latar belakang pendidikan dewan komisaris diukur menggunakan pengukuran jumlah dewan komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan yang berasal dari disiplin ilmu ekonomi dan bisnis terhadap jumlah dewan komisaris.

Dalam penelitian ini latar belakang pendidikan dewan komisaris utama dilambangkan dengan EDUKOM, yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{EDUKOM} = \frac{\sum \text{Komisaris dari disiplin ilmu ekonomi/akuntansi}}{\sum \text{Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

2. KOMITE AUDIT

A. Ukuran Komite Audit

Sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Filipovic dan Filipovic (2008) mengukur komite audit berdasarkan jumlah keseluruhan anggota komite audit baik yang berasal dari internal perusahaan maupun anggota komite audit independen. Dalam penelitian ini ukuran komite audit dilambangkan dengan SIZEDIT, yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{SIZEDIT} = \sum \text{Komite Audit Internal} + \text{Komite Audit Eksternal}$$

B. Proporsi Komite Audit Independen

Komite audit independen merupakan anggota komite audit yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali. Indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi komite audit independen dalam penelitian ini yaitu jumlah komite audit independen terhadap jumlah seluruh anggota komite audit. Dalam penelitian ini proporsi komite audit independen dilambangkan dengan PRODIT, yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{PRODIT} = \frac{\sum \text{Komite Audit Independen}}{\sum \text{Anggota Komite Audit}} \times 100\%$$

C. Jumlah Rapat Komite Audit

Diukur dengan cara melihat jumlah pertemuan (*meetings*) yang dilakukan oleh ketua dan para anggota komite audit. Variabel ini bersifat kuantitatif yang pada hasil akhirnya akan ditunjukkan dalam bentuk jumlah *meetings* (rapat) yang

dilakukan oleh komite audit. Dalam penelitian ini jumlah rapat komite audit dilambangkan dengan MEETDIT, yang dihitung dengan menggunakan rumus:

MEETDIT = jumlah rapat komite audit yang dilaksanakan dalam satu tahun fiskal.

D. Pengalaman Anggota Komite Audit Bekerja Sebagai Auditor

Diukur dengan cara membagi anggota Komite Audit yang memiliki pengalaman bekerja sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik dengan jumlah anggota Komite Audit. Variabel ini bersifat kuantitatif yang hasil akhirnya akan ditunjukkan dalam ukuran proporsi. Dalam penelitian ini pengalaman anggota komite audit bekerja sebagai auditor dilambangkan dengan EXPTOR, yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{EXPTOR} = \frac{\sum \text{Anggota Komite Audit dengan pengalaman sebagai auditor}}{\sum \text{Anggota Komite Audit}} \times 100\%$$

E. Latar Belakang Pendidikan Komite Audit

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 mewajibkan komite audit terdiri dari minimal satu orang anggota yang berlatar belakang pendidikan di bidang ekonomi dan satu orang anggota yang berlatar pendidikan di bidang hukum. Komite audit harus memiliki minimal satu orang anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi (akuntansi/keuangan). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah persentase jumlah anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan atau pengetahuan di bidang ekonomi atau akuntansi terhadap jumlah anggota komite audit. Dalam penelitian ini latar belakang pendidikan komite audit dilambangkan dengan EDUDIT, yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{EDUDIT} = \frac{\sum \text{Komite Audit dari disiplin ilmu ekonomi/akuntansi}}{\sum \text{Anggota Komite Audit}} \times 100\%$$

3. KUALITAS AUDIT

A. Audit eksternal oleh big four dan non big four

Variabel kualitas audit diukur salah satunya dengan menggunakan variabel dummy dari ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit atas bank-bank yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Jika perusahaan atau bank di audit oleh KAP Big 4 (KAP besar) maka kualitas auditnya tinggi (1), namun jika bank di audit oleh KAP Non Big 4 (KAP kecil) maka kuantitas auditnya rendah (0). Dalam penelitian ini, kualitas audit dilambangkan dengan QUADIT.

B. Opini Audit oleh Auditor Eksternal

Selain variabel audit eksternal oleh big four atau non big four sebagai proksi dari kualitas audit. Penelitian ini juga menggunakan variabel opini audit sebagai proksi dari kualitas audit. Variabel opini audit dalam penelitian ini menggunakan variabel dummy dari opini audit yang diberikan oleh auditor eksternal dimana jika perusahaan mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maka variabel dummy-nya 1 dan jika opini audit yang diberikan oleh auditor eksternal adalah selain WTP maka variabel dummy-nya adalah 0.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, berupa laporan tahunan dan laporan keuangan bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009 - 2010 yang bersumber dari situs resmi BEI ([www. Idx.co.id](http://www.idx.co.id)), dan situs resmi masing-masing perusahaan. Hal ini bertujuan untuk melihat pengaruh penerapan *corporate governance* yang dilakukan oleh perusahaan pada tahun 2009 - 2010 terhadap kinerja bank pada tahun yang bersangkutan. Adapun data yang menjadi obyek penelitian antara lain:

- a. Data mengenai ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, dan latar belakang pendidikan komisaris utama yang diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) bank yang menjadi sampel pada tahun 2009 - 2010.
- b. Data mengenai jumlah komite audit, proporsi komite audit independen, jumlah rapat komite audit, pengalaman anggota komite audit bekerja sebagai auditor,

dan latar belakang pendidikan komite audit yang diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) bank yang menjadi sampel pada tahun 2009 - 2010.

- c. Data mengenai auditor eksternal yang mengaudit bank dan merupakan proksi dari kualitas audit yang diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) bank yang menjadi sampel pada tahun 2009 - 2010.
- d. Data mengenai informasi keuangan bank untuk mengukur kinerja bank dengan menggunakan CAMEL ratio yang diperoleh dari laporan keuangan (*financial report*) bank-bank yang menjadi sampel pada tahun 2009 - 2010.

3.4 Metode Pemilihan Sampel

Unit analisa dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan. Sedangkan populasi penelitian ini adalah seluruh bank yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009 - 2010.

3.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian dalam penelitian ini dilakukan dengan mengikuti tahapan yang berlaku dalam SEM menggunakan metode *maximum likelihood estimation* (MLE). Menurut Hair et. Al. (1998), evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan model dalam SEM dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- ❖ Kecocokan keseluruhan model (*overall model fit*)
- ❖ Kecocokan model pengukuran (*measurement model fit*)
- ❖ Kecocokan model struktural (*structural model fit*)

BAB 4
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

Tabel 1. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sizekom	30	3.000	8.000	4.000	2.5000
Prokom	30	.667	.750	.500	.6552
Meetkom	30	4.000	43.000	10.000	1.3607
Edukom	30	.000	1.000	0.330	.48918
Sizedit	30	3.000	6.000	4.000	.38824
Prodit	30	.000	.750	.500	.6801
Meedit	30	2.000	16.000	13.000	7.8925
Exptor	30	.000	.667	.330	.3423
Eudit	30	.000	.667	.330	.2197
Quadit	30	.000	1.000	.700	.50855
Opdit	30	.000	1.000	.600	.49827
Valid N (listwise)	30				

Berdasarkan data pada tabel 1 maka statistik deskriptif untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata Sizekom dari 30 bank yang menjadi sampel adalah sebesar 4.00 artinya adalah rata-rata jumlah komisaris internal ditambah komisaris eksternal pada sebagian besar atau rata-rata bank yang menjadi sampel adalah sebesar 4 orang. Sedangkan minimum jumlah ukuran komisaris adalah sebesar 3 orang dan maksimum sebesar 8 orang.
2. Rata-rata Prokom dari 30 bank yang menjadi sampel adalah sebesar 0.5 artinya adalah jumlah komisaris independen dibandingkan dengan jumlah anggota komisaris mempunyai proporsi yang sama. Sedangkan minimum prokom adalah sebesar 0.667 artinya adalah jumlah komisaris independen

dibandingkan dengan jumlah anggota komisaris mempunyai proporsi yang lebih kecil atau sedikit. Sementara itu maksimum prokom adalah sebesar 0.75 artinya adalah jumlah komisaris independen dibandingkan dengan jumlah anggota komisaris mempunyai proporsi yang hampir sama.

3. Rata-rata Meetkom dari 30 bank yang menjadi sampel adalah sebesar 10.00 artinya adalah rata-rata rapat yang diadakan oleh sebagian besar bank yang menjadi sampel adalah sebesar 10 kali rapat dalam satu tahun dan hal ini sama dengan jumlah rapat yang disyaratkan oleh pemerintah, sedangkan minimum rapat yang diadakan oleh sebuah bank yang menjadi sampel adalah sebesar 4.00 artinya bank tersebut hanya melakukan rapat sebanyak 4 kali dalam setahun sementara itu untuk nilai maksimum dari bank yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 43.00 artinya terdapat sebuah bank yang mengadakan rapat dalam setahun sebanyak 43 kali. Hal ini melebihi dari yang disyaratkan oleh pemerintah.
4. Rata-rata Edukom dari 30 bank yang menjadi sampel adalah sebesar 0.33 artinya bahwa rata-rata anggota komisaris yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi adalah $\frac{1}{3}$ dari total jumlah anggota komisaris. Sedangkan minimum anggota komisaris yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi dalam sebuah bank adalah 0.00 artinya tidak ada anggota dewan komisaris dalam bank tersebut yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi atau ekonomi. Sementara itu nilai maksimum dari edukom adalah 1.00 artinya bahwa setiap anggota dewan komisaris dalam sebuah bank yang menjadi sampel mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi.
5. Rata-rata Sizedit dari 30 bank yang menjadi sampel adalah sebesar 4.00 artinya bahwa rata-rata sebagian besar bank yang menjadi sampel mempunyai jumlah komite audit (eksternal dan internal) sebesar 4 orang, sedangkan nilai minimum dari sizedit adalah sebesar 3.00 artinya terdapat sebuah bank yang mempunyai 3 orang anggota komite audit. Sementara itu jumlah maksimum sizedit dari bank yang menjadi sampel adalah sebesar 6.00 artinya terdapat sebuah bank yang mempunyai jumlah anggota komite audit sebanyak 6 orang.
6. Rata-rata Prodit dari 30 bank yang menjadi sampel adalah sebesar 0.5 artinya adalah jumlah audit independen dibandingkan dengan jumlah anggota komite

audit secara keseluruhan mempunyai proporsi yang sama. Sedangkan minimum prodit adalah sebesar 0.667 artinya adalah jumlah anggota komite audit independen dibandingkan dengan jumlah anggota komite audit secara keseluruhan mempunyai proporsi yang lebih kecil atau sedikit. Sementara itu maksimum prodit adalah sebesar 0.75 artinya adalah jumlah anggota komite audit independen dibandingkan dengan jumlah anggota komite audit secara keseluruhan mempunyai proporsi yang hampir sama.

7. Rata-rata Meedit dari 30 bank yang menjadi sampel adalah sebesar 13.00 artinya adalah rata-rata rapat komite audit yang diadakan oleh sebagian besar bank yang menjadi sampel adalah sebesar 13 kali rapat dalam satu tahun, sedangkan minimum rapat yang diadakan oleh sebuah bank yang menjadi sampel adalah sebesar 2.00 artinya komite audit pada bank tersebut hanya melakukan rapat sebanyak 2 kali dalam setahun sementara itu untuk nilai maksimum dari komite audit pada bank yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 16.00 artinya terdapat komite audit pada sebuah bank yang mengadakan rapat dalam setahun sebanyak 16 kali. Hal ini melebihi dari yang disyaratkan oleh pemerintah.
8. Rata-rata Edudit dari 30 bank yang menjadi sampel adalah sebesar 0.33 artinya bahwa rata-rata anggota komite audit yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi adalah $\frac{1}{3}$ dari total jumlah anggota komite audit secara keseluruhan. Sedangkan nilai minimum anggota komite audit yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi dalam sebuah bank adalah 0.00 artinya tidak ada anggota komite audit dalam bank tersebut yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi. Sementara itu nilai maksimum dari edudit adalah 0.667 artinya bahwa jumlah anggota komite audit yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi 70% dari total jumlah anggota komite audit secara keseluruhan.
9. Rata-rata Exptor dari 30 bank yang menjadi sampel adalah sebesar 0.33 artinya bahwa rata-rata anggota komite audit yang mempunyai pengalaman sebagai auditor adalah $\frac{1}{3}$ dari total jumlah anggota komite audit secara keseluruhan. Sedangkan nilai minimum anggota komite audit yang mempunyai pengalaman sebagai auditor dalam sebuah bank adalah 0.00 artinya tidak ada anggota

komite audit dalam bank tersebut yang mempunyai pengalaman sebagai auditor. Sementara itu nilai maksimum dari exptor adalah 0.667 artinya bahwa jumlah anggota komite audit yang mempunyai pengalaman sebagai auditor 70% dari total jumlah anggota komite audit secara keseluruhan.

10. Rata-rata Quadit dari 30 bank yang menjadi sampel adalah sebesar 0.70 artinya sebagian besar dari bank yang menjadi sampel dalam penelitian ini di audit oleh KAP Big Four dan sebagian kecil lagi di audit oleh KAP Non Big Four.
11. Rata-rata Opdit dari 30 bank yang menjadi sampel adalah sebesar 0.60 artinya bahwa sebagian besar dari bank yang menjadi sampel dalam penelitian ini mendapatkan opini audit "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" dari auditor eksternal.

4.2. Tahapan dan Hasil Pengujian

Pengujian dilakukan dengan mengikuti tahapan yang berlaku dalam SEM dengan menggunakan tiga langkah pengujian yang harus dilakukan (Hair et al., 1995) yaitu pengujian kecocokan model keseluruhan, kecocokan model pengukuran, dan kecocokan model struktural.

4.2.1. Kecocokan Model Keseluruhan

Analisa model struktural dalam SEM diawali dengan pengujian kecocokan model keseluruhan yang dilihat berdasarkan indikator *Goodness-of-fit Index* (GFI) statistik dari *output* LISREL (Hair et al.,1995). Secara keseluruhan ringkasan nilai kritis dari pengujian kecocokan keseluruhan model dapat dilihat dari rangkuman dalam Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Kecocokan Keseluruhan Model

Kriteria Kecocokan Model	Indikator Tingkat Kecocokan	Hasil Estimasi Model	Tingkat Kecocokan Model
RMSEA P (<i>close fit</i>)	RMSEA < 0,08 P < 0.05	0,21 0.00	Kurang Baik Baik
ECVI	Nilai yang lebih kecil dari Independence dan lebih dekat ke Saturated Model	$M^* = 17.17$ $S^{**} = 1.34$ $I^{***} = 5.13$	Kurang Baik (<i>Not Good fit</i>)
AIC	Nilai yang lebih kecil dari Independence dan lebih dekat ke Saturated Model	$M^* = 1041.28$ $S^{**} = 272.00$ $I^{***} = 3486.05$	Baik (<i>Good fit</i>)
CAIC	Nilai yang lebih kecil dari Independence dan lebih dekat ke Saturated Model	$M^* = 1205.37$ $S^{**} = 859.26$ $I^{***} = 3555.14$	Baik (<i>Good fit</i>)
NFI	NFI > 0,90	0.98	Baik (<i>Good fit</i>)
NNFI	NNFI > 90	0,91	Baik (<i>Good fit</i>)
CFI	CFI > 0,90	0,99	Baik (<i>Good fit</i>)
IFI	IFI > 0,90	0,60	Kurang Baik (<i>Not Good fit</i>)
RFI	RFI > 0,90	0,49	Kurang Baik (<i>Not Good fit</i>)
RMR	Standardized RMR < 0.05	0.22	Kurang Baik
GFI	GFI > 0,90, <i>good fit</i> ; 0.90 < GFI > 0.80, <i>marginal fit</i>	0,63	Kurang Baik (<i>Not Good fit</i>)

Dengan melihat secara keseluruhan hasil estimasi berdasarkan kriteria yang ada, secara keseluruhan didapatkan nilai-nilai yang marginal. Sehingga dari hasil analisa atas keandalan *output* untuk pengujian model keseluruhan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa model adalah *marginal fit*.

4.2.2. Kecocokan Model Pengukuran

Untuk uji kecocokan model pengukuran dilakukan terhadap setiap konstruk secara terpisah melalui evaluasi terhadap validitas dan reliabilitas konstruk (Wijanto, 2006). Tahap pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa konstruk yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi kriteria valid dan reliabel. Adapun tingkat validitas dan reliabilitas masing-masing konstruk dari variabel teramati dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Daftar Validitas dan Reliabilitas Model

No	VARIABEL TERAMATI	SLF	Error	VE	Keterangan
1	Dekom 1	0.710	0.49	0.929	Validitas dan Reliabilitas Baik
2	Dekom 2	0.800	0.36	0.947	Validitas dan Reliabilitas Baik
3	Dekom 3	0.780	0.39	0.942	Validitas dan Reliabilitas Baik
4	Dekom 4	0.820	0.32	0.952	Validitas dan Reliabilitas Baik
5	Komdit 1	0.630	0.61	0.913	Validitas dan Reliabilitas Baik
6	Komdit 2	0.790	0.37	0.945	Validitas dan Reliabilitas Baik
7	Komdit 3	0.580	0.66	0.906	Validitas dan Reliabilitas Baik
8	Komdit 4	0.860	0.26	0.961	Validitas dan Reliabilitas Baik
9	Komdit 5	0.840	0.3	0.955	Validitas dan Reliabilitas Baik
10	Kuadit 1	0.770	0.41	0.940	Validitas dan Reliabilitas Baik
11	Kuadit 2	0.750	0.44	0.936	Validitas dan Reliabilitas Baik

Berdasarkan data pada tabel 3 maka dapat disimpulkan bahwa dari *standard faktor loading* masing-masing variabel teramati yang lebih besar dari 0.70 maka tingkat validitas dari masing-masing variabel adalah baik. Sedangkan jika dilihat dari *variance extracted* seluruh variabel teramati yang lebih besar dari 0.50 maka dapat dikatakan bahwa masing-masing variabel mempunyai tingkat reliabilitas yang baik.

4.2.3. Kecocokan Model Struktural

Analisis ini dilakukan terhadap koefisien-koefisien persamaan struktural dengan menspesifikasikan tingkat signifikansi tertentu. Analisa model struktural ini untuk menguji hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini. Untuk tingkat signifikansi sebesar 0,05 maka nilai t dari persamaan struktural harus lebih besar atau sama dengan 1,96 atau untuk praktisnya lebih besar sama dengan 2 (Wijanto, 2008).

Model Persamaan Struktural:

- H1: Dewan komisaris sebagai indikator *Corporate Governance* mempunyai pengaruh terhadap kinerja bank.
- H2: Komite audit sebagai indikator *Corporate Governance* mempunyai pengaruh terhadap kinerja bank.
- H3: Kualitas audit sebagai indikator *Corporate Governance* mempunyai pengaruh terhadap kinerja bank.

$$\text{KNJ} = 0.56 \cdot \text{DEKOM} + 0.033 \cdot \text{KOA} + 0.44 \cdot \text{KUA}, \text{ Errorvar.} = 0.066, R^2 = 0.93$$

(0.13)	(0.100)	(0.10)	(0.057)
4.40	0.33	4.26	1.17

Dari persamaan dalam model struktural di atas dapat dilihat pada angka yang paling bawah, semua koefisien memiliki nilai t yang signifikan, kecuali untuk variabel laten Komite Audit (KOA) Persamaan ini merupakan persamaan untuk hipotesa pertama, kedua dan ketiga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesa dalam penelitian ini yaitu untuk H1, dan H3 hasilnya terbukti signifikan. Sedangkan untuk H2 atau hipotesa 2 hasilnya terbukti tidak signifikan.

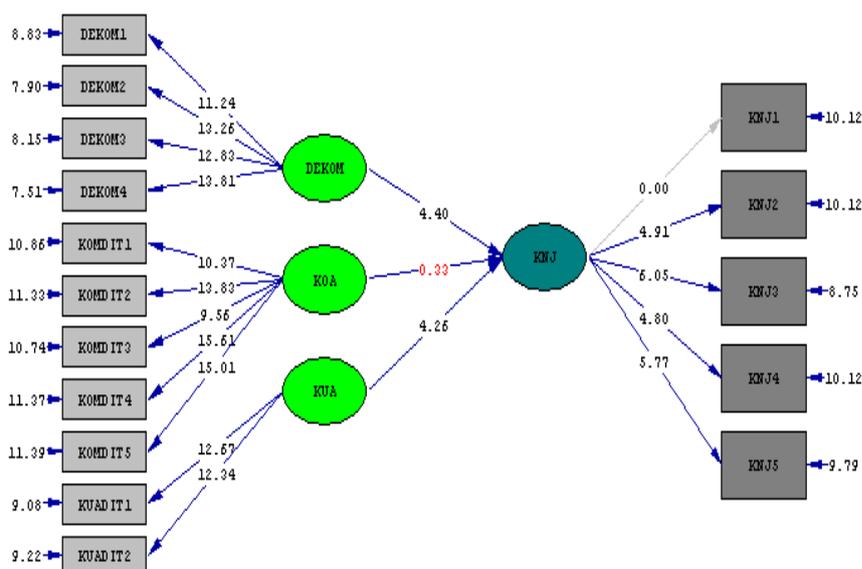
Tidak terbukti dengan signifikannya hipotesa ke 2, dapat dibuktikan dari statistik deskriptif pada variabel-variabel pertemuan atau rapat komite audit yang nilai maksimumnya terdiri dari 16 kali pertemuan dan melebihi dari yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan dari hasil penelitian ini terlihat bahwa latar pendidikan akuntansi dan pengalaman sebagai auditor tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja komite audit terhadap kinerja perbankan.

Untuk menilai seberapa baik *coefficient of determination* dari persamaan struktural, akan dilihat dari besaran dari R^2 (Wijanto, 2006). Hasil pengujian Lisrel yang dapat dilihat pada *Reduced Form Equation* didapatkan nilai R^2 untuk persamaan struktural dalam penelitian ini. Nilai R^2 dalam model penelitian ini adalah sebesar 0.93 yang berarti model ini mampu menjelaskan 93% dari perubahan pada variabel laten Kinerja Bank. Secara keseluruhan nilai t dari tiga hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini hasilnya dapat disimpulkan dalam tabel 4 berikut :

Tabel 4. Nilai t-value untuk masing-masing hipotesa

Hipotesis	Path	Estimasi	Nilai - t	Kesimpulan
1	Dekom → KNJ	0.56	4.40	Signifikan
2	KOA → KNJ	0.033	0.33	Tidak Signifikan
3	KUA → KNJ	0.44	4.26	Signifikan

Hasil path diagram pada gambar 3 berikut, menunjukkan model struktural yang dihasilkan dari output Lisrel.



Gambar 3. Path Diagram Model Struktural

4.3. Analisa Hasil Pengujian

Berdasarkan model persamaan struktural yang dihasilkan, mengkonfirmasi bahwa dewan komisaris terbukti secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan. Artinya adalah semakin besar pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris atas operasional perbankan maka akan semakin tinggi kinerja yang dihasilkan oleh perbankan. Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yaitu Rosentein dan Wyatt (1990), Dalton et al (1999), Nasution dan Setiawan (2007), dan Abeysekera (2008).

Hipotesa kedua yang menguji pengaruh dari komite audit terhadap kinerja perbankan hasilnya juga terbukti positif namun pengaruhnya tidak signifikan. Hasil ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yaitu Herwidayatmo (2000), Xie, Davidson dan DaDalt (2003), dan Abeysekera (2008). Hanya saja dalam penelitian ini walaupun sign yang dihasilkan mendukung penelitian-penelitian terdahulu namun pengaruhnya tidak secara signifikan. Hal ini dapat dijelaskan dari adanya bank yang mempunyai jumlah anggota komite audit yang sangat banyak dan melebihi dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan Bapepam. Selain itu juga terdapat bank yang komite auditnya melakukan rapat atau pertemuan sampai 16 kali dalam satu tahun dan pertemuan ini melebihi dari yang disyaratkan oleh pemerintah.

Hipotesa ketiga yang menguji pengaruh dari kualitas audit terhadap kinerja bank hasilnya juga terbukti positif dan berpengaruh secara signifikan. Artinya adalah semakin besar kualitas audit dari sebuah bank maka akan semakin baik kinerja yang dihasilkan oleh bank tersebut. Hasil ini memperkuat hasil penelitian terdahulu seperti penelitian Jensen dan Meckling (1976), Watts dan Zimmerman (1986), dan penelitian Kell (2001).

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

1. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai penelitian sebelumnya yang dilakukan terkait dengan pengaruh penerapan corporate governance terhadap kinerja bank. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana penerapan corporate governance dapat berpengaruh pada baik atau buruknya kinerja bank. Model ini menggunakan 30 data perusahaan perbankan.
2. Hipotesis 1 yang menguji apakah dewan komisaris sebagai salah satu indikator dalam *corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja perbankan terbukti secara signifikan dan terlihat pada hasil output *structural equations* dengan nilai estimasi positif artinya adalah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja bank. Semakin baik *performance* dewan komisaris maka akan semakin baik kinerja perbankan.
3. Hipotesis 2 yang menguji apakah komite audit sebagai salah satu indikator dalam *corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja perbankan terbukti tidak berpengaruh secara signifikan dan terlihat pada hasil output *structural equations* dengan nilai estimasi positif artinya adalah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja bank. Semakin baik *performance* dewan komisaris maka akan semakin baik kinerja perbankan.
4. Hipotesis 3 yang menguji apakah kualitas audit sebagai salah satu indikator dalam *corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja perbankan terbukti secara signifikan dan terlihat pada hasil output *structural equations* dengan nilai estimasi positif artinya adalah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja bank. Semakin baik *performance* dewan komisaris maka akan semakin baik kinerja perbankan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk memperbanyak jumlah sampel dan memperlebar tahun pengamatan (*firm years*) dan menambahkan variabel dalam *corporate governance* yang diduga mempunyai pengaruh terhadap kinerja perbankan. Dengan memasukkan variabel tersebut diharapkan hasil penelitiannya dapat lebih sesuai dengan fakta di lapangan.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu dalam hal jumlah responden yang digunakan sedikit sehingga tidak dapat dilakukan pengujian dengan metode *weighted least square* (WLS) yang kemungkinan akan memberikan hasil yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abeysekera, I. (2008). The role of corporate governance in intellectual capital disclosure in Kenyan listed firms. *www.ssrn.com*. 30 Agustus 2011.
- Adams, R. & Mehran, H. (2003). Is corporate governance different from bank holding companies? *FRBNY Economic Policy Review*, 9, pp. 123-142.
- Alijoyo, F. Antonius. (2003). Keberadaan & peran komite audit dalam rangka implementasi GCG. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional GCG–FKSPI BUMN/BUMD wilayah Jawa Timur, Surabaya-Indonesia tanggal 7 Mei 2003.
- Andres, P., Azofra, V., Lopez, F. (2005). Corporate boards in OECD countries: size, composition, functioning and effectiveness. *Journal of Corporate Governance*, 13 (2): 197-210.
- Annual report bank-bank di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009 – 2010.
- Belkhir, M. (2005). Board structure, ownership structure, and firm performance: evidence from banking. Available at SSRN: <<http://papers.ssrn.com/so13/papers.cfm?paper=604505>>.
- Bhagat, S. & Black, B. (1999). The uncertain relationship between board composition and firm performance. *Business Lawyer*, 54, pp. 921-963.
- Brick E, Ivan dan Chidambaran N.K. (2007). Board Meetings, Committee Structure and Firm Performance. <http://ssrn.com>. 21 Agustus 2011.
- Clarkson, M.B.E. (1994). “A Risk Based Model of Stakeholder Theory, The Centre for Corporate Social Performance and Ethics.” University of Toronto.
- Dalton, Dan R., et. al. (1999). “Number of Director and Financial Performance: a Meta Analysis.” *Academy of Management Journal* 42:6.
- Darmawanti, Rahayu dan Khomsiyah. (2004). Corporate Governance dan Manajemen Laba: Suatu Studi Empiris. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol 5 No.1, 47-68
- DeZoort, F. T. (1998). An analysis of experience effects on audit committee members’ oversight judgments. *Accounting, Organizations and Society* 23, 1–21.

- DeZoort, F. T., Salterio, S. (2001). The effects of corporate governance experience and financial reporting and audit knowledge on audit committee members' judgments. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 20, 31-47.
- Eisenberg, T. Sundgren. D., & Well, M. (1998). Larger board size and decreasing firm value in small firms. *Journal of Financial Economics*. 48 (1), pp. 35-54.
- Fama, E.F. dan Jensen, M.C. (1983). Separation of Ownership and Control. *Journal of Law & Economics* 26 (2): 301-28.
- Filipovic, D. dan I. Filipovic. (2008). An Enterprise Odyssey. *International Conference Proceedings*. Zagreb: Jun 11-Jun 14, 2008 page 1094-1109.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. (2001). Peranan dewan komisaris dan komite audit dalam pelaksanaan corporate governance. *Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)*, Jilid II. Edisi ke-2. Jakarta.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. (2002). Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (*Tata Kelola Perusahaan*).
- Ghozali, Imam. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketiga. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hegazy, M., dan Hegazy, K. (2010). Corporate governance in the U.K: Audit committees and disclosure arrangements—A web-based analysis. *Journal of Business Studies Quarterly*, 1 (2): 32-55.
- Hermalin, B. E. & Weisbach, M.S. (2003). Board of directors as an endogenously determined institution: a survey of the economic literature. *FRBNY Economic Policy Review*, 9, pp. 7-26.
- Herwidayatmo. (2000). Implementasi good corporate governance untuk perusahaan publik Indonesia. Artikel pada majalah *Usahawan* No. 10 Th XXIX, Oktober 2000.
- Herwidayatmo. (2004). Implementasi Good Corporate Governance untuk Perusahaan Publik Indonesia. *Usahawan*, No. 10, Th XXIX, Oktober 2000.
- Ho, Simon S.M. dan Wong, Kar Shun. (2001). A study of relationship between corporate governance structure and extent of voluntary disclosure. *Journal of International Accounting Auditing and Taxation*, (10): 139-156.

- Jensen, Michael C. and William H. Meckling. (1976). "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics* 3:4, pp. 305-360.
- Kaihatu, Thomas S. (2006). "Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 8:1, hal: 1-9.
- Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: kep. 29/PM/2004 Peraturan Nomor IX.I.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. <http://www.bapepam.go.id/old/hukum/peraturan/IX/IX.I.5.pdf>. 9 November 2010.
- Kinney, W., and Martin, R. (1994). Does auditing reduce bias in financial reporting? A review of audit related adjustment studies. *Auditing : A Journal of Practice and Theory* 13, 149-156.
- Kusumastuti, Sari, Supatmi dan Perdana Satra. (1998). "Pengaruh Board Diversity Terhadap Nilai Perusahaan dalam Perspektif Corporate Governance." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 9:2, hal: 88-98.
- Kole, S. (1997). The complexity of compensation contracts. *Journal of Financial Economics*, 43 (1), pp. 79-104.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. <http://governance-indonesia.com>. 9 November 2010.
- Lie, Jing, Richard Pike, dan Roszaini Haniffa. (2008). Intellectual Capital Disclosure and Corporate Governance Structure in UK Firms. *Accounting and Business Research*, 38 (2): 137-159.
- Macey, Jonathan R., & O'Hara, Maureen. (2003). The corporate governance of banks. *FRNBY Economic Policy Review*.
- Massen, Gregory Fancesco. (2000). *An International Comparison of Corporate Governance Models*. Netherlands: Rotterdam School of Management.
- Moeljono, Djokosantoso. (2002). *Good Corporate Culture Sebagai Inti dari Good Corporate Governance*
- Nachrowi, D. Nachrowi dan Hardius Usman. (2006) *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Nasution, MARIHOT dan Setiawan, Doddy. (2007). Pengaruh corporate governance terhadap manajemen laba di industri perbankan. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- OECD. (1998). "Corporate Governance: Improving Competitiveness and Access to Capital in Global Markets." OECD Report.
- Organization for Economic Corporation and Development (OECD). (2004). Principles of corporate governance. <http://www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf>. 9 November 2010.
- Pathan, S., M. Skully dan J. Wickramanayake. (2007). Board size, independence and performance: an analysis of Thai banks. *Asia-Pacific Financial Markets* 14(3): 211–227.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. <http://bi.go.id>. 5 September 2010.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
- Putri, Vicky Rahma dan Niki Lukviarman. (2008). Pengukuran Kinerja Bank Komersial Dengan Pendekatan Efisiensi: Studi Terhadap Perbankan Go-Public Di Indonesia. *Jurnal JAAI* 12 (1): 37.
- Rosenstein, S. & Wyatt, j. (1990). Outside directors, board independence, and shareholders wealth. *Journal of Financial Economics*, 26 (2), pp. 175-184.
- Siallagan, Hamonangan dan Mas'ud Machfoedz. (2006). Mekanisme corporate governance, kualitas laba dan nilai perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Surat Edaran Bank Indonesia tentang Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia <http://www.bi.go.id/biweb/utama/peraturan/SE.Lap.publikasi.PDF>. 31 Oktober 2011.
- Syakhroza, Akhmad. (2003). "Teori Corporate Governance." *Usahawan* N0. 08 Tahun XXXII.
- Skully, M.T. (2002). Banking and Corporate Governance: some prudential issues. Presented in Second International Conference on Banking and Finance in Greece.

Tjager, I. Nyoman et.al. (2003). Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia. PT Prenhallindo, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Vafeas, N. 2003. Futher Evidence on Compensation Committee Composition As A Determinant of CEO Compensation, *Financial Management* 32(2): 53-77.

Watts, R. L. and J.L. Zimmerman. (1986). *Positive Accounting Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Xie, Biao, Wallace N. Davidson, Peter J. DaDalt. (2003). Earnings management and corporate governance: the role of the board and the audit committee. *Journal of Corporate Finance* 9: 295– 316.

Lampiran

A. Personalia Penelitian

1. Peneliti

- 1. Nama Lengkap : Irma, S.E., M.Sak.
- 2. Jenis Kelamin : Perempuan
- 3. NIP : 19750831 199903 2 001
- 4. Bidang Ilmu : Manajemen
- 5. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I, Gol. III/ b
- 6. Jabatan : Asisten Ahli
- 7. Fakultas/Program Studi : Ekonomi / Akuntansi
- 8. Waktu Penelitian : 8 jam/minggu

2. Tenaga Administrasi : Pery Periyatna

3. Pemanfaatan hasil penelitian : artikel ilmiah, abdimas, dan buku ajar

B. Jadwal Kegiatan

Penelitian ini direncanakan dilakukan selama 9 bulan, sejak penulisan proposal sampai penulisan laporan. Adapun jadwal kegiatan penelitian ini seperti pada Tabel 1.

Tabel 1
Jadwal Penelitian Keilmuan 2012

No.	Kegiatan	Bulan ke-								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tahap persiapan										
1.	Menyusun proposal	■	■							
2.	Penelusuran pustaka	■	■							
3.	Mereview proposal			■						
4.	Menyusun instrumen			■						
5.	Memperbaiki instrumen			■						
Tahap pelaksanaan										
1.	Mengumpulkan data				■	■	■			
2.	Menganalisis data				■	■	■			
Tahap penulisan laporan										
1.	Menyusun draft laporan							■	■	
2.	Merevisi draft laporan							■	■	
Finalisasi										
1.	Menyusun laporan								■	■
2.	Menggandakan dan Menjilid laporan									■
3.	Seminar									■
4.	Penulisan artikel untuk jurnal									■

C. Perkiraan Biaya Penelitian

Perkiraan biaya penelitian yang dibutuhkan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Perkiraan Biaya Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Rincian						Jumlah (Rp)
I. Tahap persiapan								
1	Penyusunan proposal	5	x	2	x	150,000	1,500,000	
2	Penelusuran pustaka	5	x	2	x	150,000	1,500,000	
3	Penyusunan Instrumen		x		x			
	a. Pembuatan draft instrumen penelitian	5	x	2	x	150,000	1,500,000	
	b. Reviu instrumen	3	x	2	x	150,000	900,000	
	c. Penggandaan instrumen penelitian	3	x	15	x	300	13,500	
	d. Uji coba instrumen penelitian	3	x	2	x	150,000	900,000	
	e. Finalisasi instrumen penelitian	3	x	2	x	150,000	900,000	
4	Bahan dan peralatan (ATK)						1,000,000	
Sub Total I								8,213,500
II. Tahap pelaksanaan								
1	Dokumentasi						500,000	
2	Pengumpulan Data							
	a. Pembelian Data	100	x	1	x	50,000	5,000,000	
	b. Transport	6	x	2	x	250,000	3,000,000	
3	Pengolahan Data							
	a. Coding data	100	x	1	x	12,500	1,250,000	
	b. Entry data	100	x	1	x	12,500	1,250,000	
	c. Analisis data	100	x	1	x	12,500	1,250,000	
Sub Total II								12,250,000
III. Tahap penulisan laporan								
1	Penulisan laporan							
	a. Penyusunan draft laporan	5	x	2	x	150,000	1,500,000	
	b. Finalisasi draft laporan	3	x	2	x	150,000	900,000	
	c. Persiapan Ekspose hasil penelitian	3	x	2	x	150,000	900,000	
	a. Penyusunan powerpoint	3	x	2	x	150,000	900,000	
	b. Revisi draft laporan	3	x	2	x	150,000	900,000	
2	Penggandaan laporan							
	a. Penggandaan laporan	100	x	8	x	300	240,000	
	b. Penjilidan laporan	8	x	2	x	150,000	2,400,000	
3	Penulisan makalah seminar	3	x	2	x	150,000	900,000	
4	Penulisan artikel untuk jurnal	3	x	2	x	150,000	900,000	
Sub Total III								9,540,000
TOTAL I + II + III								30,003,500

**CURRICULLUM VITAE (CV)
Peneliti**

1. Nama : Irma, S.E., M.S.ak
2. NIP : 19750831 199903 2 001
3. Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 31 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Status : Menikah
7. Pangkat/Golongan : Penata Muda/ III/b
8. Jabatan : Asisten Ahli
9. Alamat Rumah : Perumahan D' Area Permata Kavling B No:1.
Sawangan, Depok..
10. Alamat Kantor : Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat, Pamulang
11. Alamat E-mail : Irma@ut.ac.id
12. Riwayat Pendidikan :

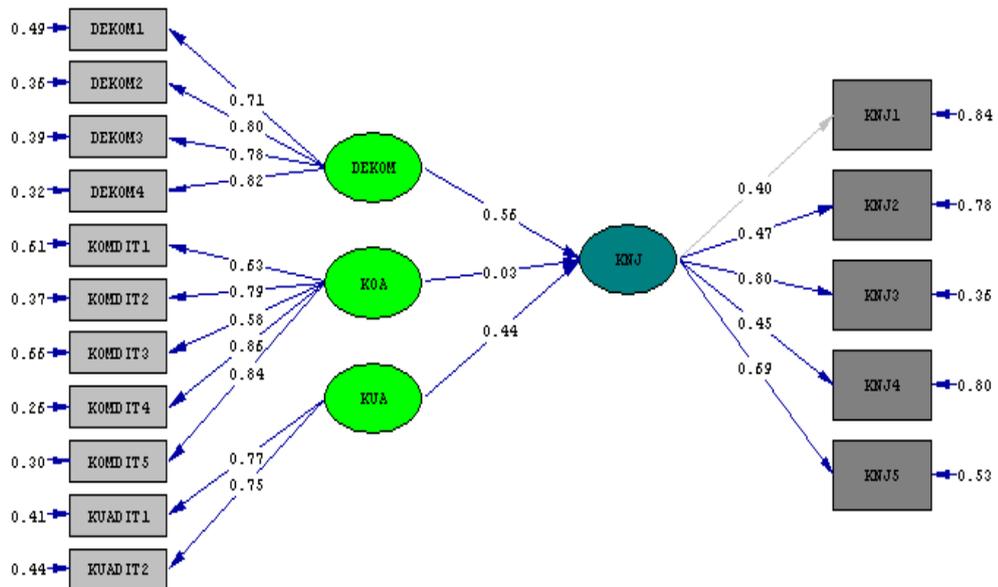
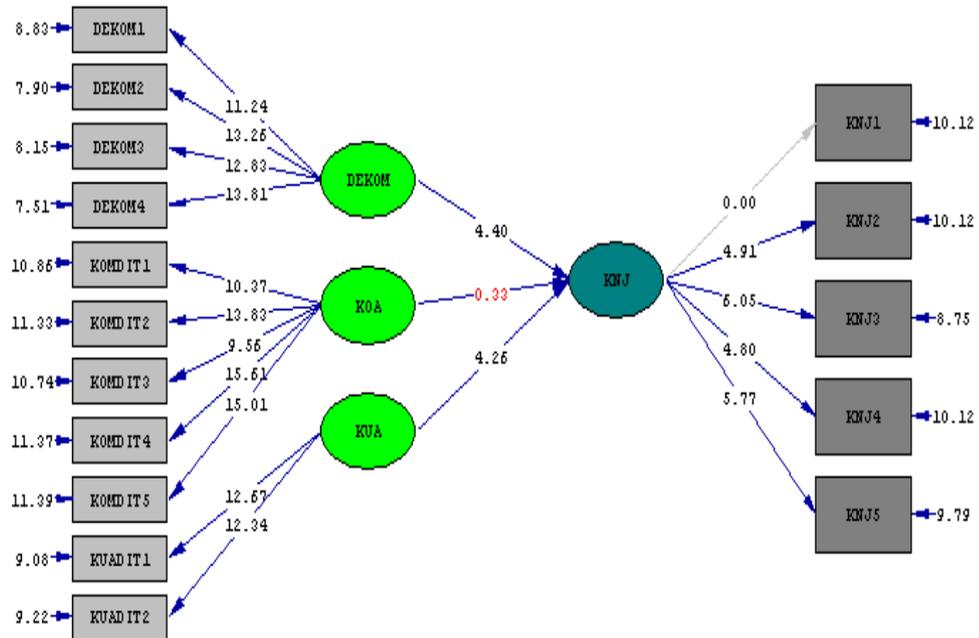
No.	Jenjang Pendidikan	Jurusan	Tahun Lulus
1.	S1 Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "Indonesia"	Akuntansi	1998
2.	S2 Fakultas Ekonomi Pasca Sarjana Ilmu Akuntansi (PPIA) Universitas Indonesia	Akuntansi	2010

13. Pengalaman Mengajar : Akuntansi Manajemen, Sistem Pengendalian Manajemen

14. Pengalaman Penelitian:

No.	Judul	Keterangan	Tahun
1.	Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi (Studi kasus pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)).	Penelitian	2010

HASIL PENGOLAHAN DATA



Chi-Square=965.28, df=98, P-value=0.00000, RMSEA=0.209

DATE: 11/28/2012

TIME: 19:10

L I S R E L 8.50

BY

Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom

This program is published exclusively by
Scientific Software International, Inc.
7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100
Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.
Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140
Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2001
Use of this program is subject to the terms specified in the
Universal Copyright Convention.
Website: www.ssicentral.com

The following lines were read from file C:\Documents and Settings\Globalstatistik\My Documents\BUIRMASEM.spj:

Raw Data from file 'C:\Documents and Settings\Globalstatistik\My Documents\BUIRMASEM.psf'
Latent Variables KNJ DEKOM KOA KUA
Relationships
KNJ1 - KNJ5 = KNJ
DEKOM1 - DEKOM4 = DEKOM
KOMDIT1 - KOMDIT5 = KOA
KUADIT1 - KUADIT2 = KUA
KNJ = DEKOM KOA KUA
Path Diagram
Admissibility Check = Off
Iterations = 250
Method of Estimation: Maximum Likelihood
End of Problem

Bootstrapping Sample = 204

Covariance Matrix

	KNJ1	KNJ2	KNJ3	KNJ4	KNJ5	DEKOM1
KNJ1	1.37					
KNJ2	1.39	1.88				
KNJ3	0.48	0.66	1.82			
KNJ4	0.34	0.45	0.70	2.24		
KNJ5	0.42	0.51	1.00	0.56	1.96	
DEKOM1	0.46	0.61	0.76	0.54	0.88	1.90
DEKOM2	0.51	0.76	0.87	0.43	1.04	1.12
DEKOM3	0.41	0.55	0.87	0.47	0.99	1.09

DEKOM4	0.45	0.62	1.04	0.62	1.74	1.01
KOMDIT1	0.59	0.80	1.28	0.77	1.25	1.18
KOMDIT2	0.57	0.79	1.73	0.88	1.18	0.95
KOMDIT3	0.47	0.58	0.89	1.32	0.77	0.64
KOMDIT4	0.51	0.72	1.17	0.71	0.85	0.80
KOMDIT5	0.53	0.70	1.07	0.77	0.83	0.94
KUADIT1	0.44	0.65	1.14	0.70	0.83	0.78
KUADIT2	0.46	0.60	1.00	0.81	0.75	0.88

Covariance Matrix

	DEKOM2	DEKOM3	DEKOM4	KOMDIT1	KOMDIT2	KOMDIT3
DEKOM2	1.72					
DEKOM3	1.07	1.63				
DEKOM4	1.18	1.09	1.91			
KOMDIT1	1.23	1.14	1.43	2.11		
KOMDIT2	1.02	1.04	1.23	1.50	1.98	
KOMDIT3	0.65	0.70	0.79	1.04	1.05	1.62
KOMDIT4	0.82	0.81	0.88	1.07	1.35	0.90
KOMDIT5	0.94	0.94	0.90	1.27	1.28	1.07
KUADIT1	0.83	0.82	0.85	1.05	1.31	0.87
KUADIT2	0.86	0.90	0.82	1.16	1.20	1.01

Covariance Matrix

	KOMDIT4	KOMDIT5	KUADIT1	KUADIT2
KOMDIT4	2.08			
KOMDIT5	1.25	2.03		
KUADIT1	1.96	1.20	1.98	
KUADIT2	1.18	1.91	1.12	1.93

Number of Iterations = 51

LISREL Estimates (Maximum Likelihood)

Measurement Equations

$$\text{KNJ1} = 0.47 * \text{KNJ}, \text{Errorvar.} = 1.15, R^2 = 0.16$$

(0.11)
10.12

$$\text{KNJ2} = 0.64 * \text{KNJ}, \text{Errorvar.} = 1.47, R^2 = 0.22$$

(0.13) (0.15)
4.91 10.12

$$\text{KNJ3} = 1.08 * \text{KNJ}, \text{Errorvar.} = 0.65, R^2 = 0.64$$

(0.18) (0.075)
6.05 8.75

$$\text{KNJ4} = 0.67 * \text{KNJ}, \text{Errorvar.} = 1.79, R^2 = 0.20$$

(0.14) (0.18)
4.80 10.12

$$\text{KNJ5} = 0.96 * \text{KNJ}, \text{ Errorvar.} = 1.04, R^2 = 0.47$$

(0.17)	(0.11)
5.77	9.79

$$\text{DEKOM1} = 0.98 * \text{DEKOM}, \text{ Errorvar.} = 0.93, R^2 = 0.51$$

(0.087)	(0.11)
11.24	8.83

$$\text{DEKOM2} = 1.05 * \text{DEKOM}, \text{ Errorvar.} = 0.62, R^2 = 0.64$$

(0.079)	(0.078)
13.26	7.90

$$\text{DEKOM3} = 1.00 * \text{DEKOM}, \text{ Errorvar.} = 0.63, R^2 = 0.61$$

(0.078)	(0.077)
12.83	8.15

$$\text{DEKOM4} = 1.14 * \text{DEKOM}, \text{ Errorvar.} = 0.61, R^2 = 0.68$$

(0.082)	(0.082)
13.81	7.51

$$\text{KOMDIT1} = 0.91 * \text{KOA}, \text{ Errorvar.} = 1.29, R^2 = 0.39$$

(0.088)	(0.12)
10.37	10.86

$$\text{KOMDIT2} = 1.11 * \text{KOA}, \text{ Errorvar.} = 0.74, R^2 = 0.63$$

(0.080)	(0.065)
13.83	11.33

$$\text{KOMDIT3} = 0.74 * \text{KOA}, \text{ Errorvar.} = 1.07, R^2 = 0.34$$

(0.078)	(0.100)
9.56	10.74

$$\text{KOMDIT4} = 1.24 * \text{KOA}, \text{ Errorvar.} = 0.53, R^2 = 0.74$$

(0.080)	(0.047)
15.61	11.37

$$\text{KOMDIT5} = 1.19 * \text{KOA}, \text{ Errorvar.} = 0.60, R^2 = 0.70$$

(0.080)	(0.053)
15.01	11.39

$$\text{KUADIT1} = 1.08 * \text{KUA}, \text{ Errorvar.} = 0.82, R^2 = 0.59$$

(0.085)	(0.090)
12.67	9.08

$$\text{KUADIT2} = 1.04 * \text{KUA}, \text{ Errorvar.} = 0.84, R^2 = 0.56$$

(0.085)	(0.091)
12.34	9.22

Structural Equations

$$\text{KNJ} = 0.56 \cdot \text{DEKOM} + 0.033 \cdot \text{KOA} + 0.44 \cdot \text{KUA}, \text{ Errorvar.} = 0.066, R^2 = 0.93$$

(0.13)	(0.100)	(0.10)	(0.057)
4.40	0.33	4.26	1.17

Correlation Matrix of Independent Variables

	DEKOM	KOA	KUA
DEKOM	1.00		
KOA	0.80 (0.04) 21.71	1.00	
KUA	0.75 (0.05) 14.45	1.17 (0.03) 36.97	1.00

W_A_R_N_I_N_G: Matrix above is not positive definite

Covariance Matrix of Latent Variables

	KNJ	DEKOM	KOA	KUA
KNJ	1.00			
DEKOM	0.91	1.00		
KOA	0.99	0.80	1.00	
KUA	0.90	0.75	1.17	1.00

W_A_R_N_I_N_G: Matrix above is not positive definite

Goodness of Fit Statistics

Degrees of Freedom = 98

Minimum Fit Function Chi-Square = 1441.92 (P = 0.0)

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 965.28 (P = 0.0)

Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 867.28

90 Percent Confidence Interval for NCP = (771.39 ; 970.62)

Minimum Fit Function Value = 7.10

Population Discrepancy Function Value (F0) = 4.27

90 Percent Confidence Interval for F0 = (3.80 ; 4.78)

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.21

90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.20 ; 0.22)

P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.00

Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 5.13

90 Percent Confidence Interval for ECVI = (4.66 ; 5.64)

ECVI for Saturated Model = 1.34

ECVI for Independence Model = 17.17

Chi-Square for Independence Model with 120 Degrees of Freedom = 3454.05

Independence AIC = 3486.05
 Model AIC = 1041.28
 Saturated AIC = 272.00
 Independence CAIC = 3555.14
 Model CAIC = 1205.37
 Saturated CAIC = 859.26

Normed Fit Index (NFI) = 0.98
 Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.91
 Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.48
 Comparative Fit Index (CFI) = 0.99
 Incremental Fit Index (IFI) = 0.60
 Relative Fit Index (RFI) = 0.49

Critical N (CN) = 19.79

Root Mean Square Residual (RMR) = 0.22
 Standardized RMR = 0.12
 Goodness of Fit Index (GFI) = 0.63
 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.48
 Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.45

The Modification Indices Suggest to Add the

Path to	from	Decrease in Chi-Square	New Estimate
KOMDIT1	DEKOM	72.1	1.17
KOMDIT1	KUA	27.6	0.41
KOMDIT2	DEKOM	23.1	0.56
KOMDIT2	KUA	9.1	0.26
KOMDIT3	KUA	13.7	0.25
KOMDIT4	DEKOM	54.1	-0.82
KOMDIT4	KUA	59.5	-0.81
KOMDIT5	DEKOM	9.5	-0.35
KOMDIT5	KUA	15.5	-0.38

The Modification Indices Suggest to Add an Error Covariance

Between	and	Decrease in Chi-Square	New Estimate
KNJ2	KNJ1	142.3	1.09
DEKOM4	KNJ5	118.2	0.70
KOMDIT2	KNJ3	76.0	0.47
KOMDIT2	KOMDIT1	44.1	0.42
KOMDIT3	KNJ4	47.8	0.66
KOMDIT3	KOMDIT1	18.4	0.34
KOMDIT3	KOMDIT2	11.4	0.20
KOMDIT5	KNJ5	8.3	-0.16
KOMDIT5	KOMDIT3	8.5	0.15
KOMDIT5	KOMDIT4	34.8	-0.24
KUADIT1	KOMDIT1	43.8	-0.40
KUADIT1	KOMDIT2	20.5	-0.26
KUADIT1	KOMDIT3	22.1	-0.25
KUADIT1	KOMDIT4	254.5	0.93
KUADIT1	KOMDIT5	19.7	-0.25
KUADIT2	KOMDIT1	21.2	-0.29
KUADIT2	KOMDIT2	28.9	-0.31
KUADIT2	KOMDIT4	12.1	-0.20
KUADIT2	KOMDIT5	182.2	0.78

Time used: 0.250 Second

